

***KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN MUSLIM
DALAM MEMBANGUN KESETARAAN GENDER***

***“STUDI KASUS ANGGOTA DPRD PEREMPUAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU”***



TESIS

Oleh:

Rajabbul Amin, S.Sos

NIM: 24202011021

DOSEN PEMBIMBING TESIS

Prof. Alimatul Qibtiyah, M.Si, M.A.Ph.D

NIP. 19710919 199603 2 001

Diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis**

**Yogyakarta
2026**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-434/Un.02/DD/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : Komunikasi Politik Perempuan Muslim dalam Membangun Kesetaraan Gender: Studi Kasus Anggota DPRD Perempuan Provinsi Kepulauan Riau

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAJABBUL AMIN, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 24202011021
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 69a7e3cc66634

Ketua Sidang/Penguji I

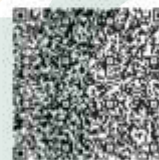
Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 69a80a7069422

Penguji II

Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A.
SIGNED



Valid ID: 69a7c91d3ca2d

Penguji III

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 69a8c2672baad

Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Rajabbul Amin, S.Sos
NIM : 24202011021
Judul Tesis : Komunikasi Politik Perempuan Muslim dalam Membangun
Kesetaraan Gender Studi Kasus Anggota DPRD Perempuan Provinsi Kepulauan Riau

tesis tersebut sudah memenuhi syarat

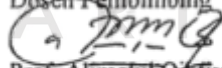
- o Bebas dari unsur plagiarisme.
- o Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- o Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini kami berharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Februari 2026 -

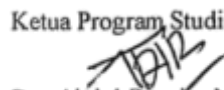
Dosen Pembimbing


Prof. Alimatul Qofiyah, M.Si, M.A.Ph.D

NIP. 19710919 199603 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi


Dr. Abdul Rozak, M.Pd

NIP. 19671006 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajabbul Amin, S.Sos
NIM : 24202011021
Prodi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: Komunikasi Politik Perempuan Muslim dalam Membangun Kesetaraan Gender Studi Kasus Anggota Perempuan DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Februari 2006

Yang menyatakan,



Rajabbul Amin, S.Sos

NIM. 24202011021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadira Allah SWT, atas segala Rahmat, nikmat kesehatan serta kekuasaan yang tiada henti mengiringi setiap proses panjang perjalanan akademik ini, karya tesis ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam kepada orang-orang yang menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjuangan. Pertama dan terutama tesis ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan bakti kepada kedua orang tua tercinta. Kepada ayahanda Mustafa, S.Ap dan Ibunda Syamsiah, S.Pd.SD. yang tidak pernah lelah menghadirkan doa dalam setiap sujudnya, yang senantiasa memberikan dukungan tanpa syarat, baik dalam bentuk pengorbanan, nasihat, maupun kasih saying yang tidak ternilai. Perjalanan pendidikan hingga tahap ini tidak akan pernah tercapai tanpa keteguhan hati dan keikhlasan kedua orang tua dalam mendampingi dari jauh maupun dekat. Setiap capaian akademik yang diraih sejatinya merupakan refleksi dari doa-doa yang tidak pernah putus.

Karya ini juga menjadi saksi perjalanan merantau yang penuh dinamika. Jauh dari keluarga, berada di lingkungan baru, serta menghadapi berbagai tantangan akademik dan sosial, menjadi proses pembelajaran kehidupan yang memperkuat ketahanan diri, kedewasaan berpikir, dan komitmen terhadap pendidikan. Pengalaman merantau tidak hanya membentuk kapasitas intelektual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perjuangan memiliki makna, ketika dijalani dengan kesungguhan dan kepercayaan.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penuli juga mempersembahkan karya ini kepada Prof. Alimatul Qibtiyah, M.Si, M.A.Ph.D, selaku dosen pembimbing tesis, yang telah memberikan arahan ilmiah, bimbingan intelektual, serta ruang dialog yang konstruktif sepanjang proses penyusunan tesis, kesabaran, ketelitian serta dedikasi beliau dalam membimbing telah membantu penulis memahami proses penelitian secara lebih kritis, sistematis dan bertanggung jawab secara akademik.

Persembahan ini turut ditujukan kepada keluarga besar, sahabat, serta rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moral, serta energi positif selama proses studi. Kehadiran mereka menjadi penguat di tengah kelelahan sekaligus pengingat bahwa perjalanan akademik tidak mudah dilalui sendirian. Karya ini juga penulis persembahkan kepada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atas ketekunan, kesabaran dan komitmen yang terus dijaga hingga tahap penyelesaian. Semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi pijakan untuk kontribusi keilmuan yang lebih luas serta menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat.

MOTO

Jika hari ini karyamu belum dihargai teruslah berkarya. Waktu akan menemukan nilainya

*Menanam Padi di Tepi Rawa
Airnya Surut Saat Senja Tiba
Jangan berhenti saat tak dipuja
Karya sejati dikenang selamanya*



ABSTRAK

Perjalanan politik perempuan Indonesia menunjukkan kontradiksi antara regulasi dan realitas. Meski kebijakan afirmasi kuota 30 % telah diterapkan, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau masih minim akibat budaya patriarki dan struktur politik maskulin. Padahal, sejarah lokal mencatat kepemimpinan perempuan yang kuat. Karena itu penting untuk melihat bagaimana pendekatan pemahaman gender dalam Islam Politisi Perempuan Muslim di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, bagaimana komunikasi politik politisi dalam membangun kesetaraan gender, serta bagaimana strategi komunikasi dalam memanfaatkan media sosial dan forum dakwah untuk mensosialisasikan isu kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sederhana dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi data. Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada pendekatan pemahaman gender, teori Konvergensi Simbolik, Teori Computer Mediated Communication serta pendekatan pemahaman terhadap isu gender dalam islam menurut Alimatul Qibtiyah.

Hasil survey penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman moderat sama kuatnya dengan pemahaman progresif. Namun jika dilihat secara terperinci dengan data kualitatif posisi yang paling dominan adalah pemahaman moderat. Responden cenderung mengakui kesetaraan gender di ruang publik namun tetap mempertahankan kepemimpinan dalam keluarga dan dalam ibadah secara tradisional sebagai bentuk negosiasi antara keadilan gender dan norma keagamaan. Di sisi lain, sebagian politisi menunjukkan pemahaman progresif dengan mengkritisi budaya patriarki dan kebijakan yang mereproduksi ketimpangan gender. Komunikasi politik perempuan muslim dijalankan secara persuasif berbasis nilai keagamaan, kedekatan emosional serta praktik kultural dan digital. Pemanfaatan media sosial memperluas jangkauan isu gender, namun tetap dibayangi tantangan bias gender dan serangan personal. Penguatan peran politik perempuan Muslim memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan komunikatif, agar kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih substantif dan berkelanjutan dalam kehidupan politik lokal.

Kata Kunci : Komunikasi Politik; Kesetaraan Gender; Perempuan Muslim: Kepulauan Riau

ABSTRACT

The political journey of Indonesian women reveals a contradiction between regulation and reality. Although the 30 percent affirmative quota policy has been implemented, women's representation in the Regional House of Representatives (DPRD) of the Riau Islands Province remains limited due to persistent patriarchal culture and masculine political structures. In fact, local history records strong female leadership. Therefore, it is important to examine how Muslim women politicians in the DPRD of the Riau Islands Province understand gender from an Islamic perspective, how they practice political communication in promoting gender equality, and how they develop communication strategies through social media and religious forums (dakwah) to socialize gender equality issues. This study employs a simple qualitative and quantitative research method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews and observations, then analyzed using data triangulation techniques. The analytical framework refers to gender understanding approaches, Symbolic Convergence Theory, Computer-Mediated Communication Theory, and Islamic perspectives on gender issues as articulated by Alimatul Qibtiyah.

The survey findings indicate that moderate understanding is as strong as progressive understanding. However, based on detailed qualitative data, the dominant position is moderate understanding. Respondents tend to acknowledge gender equality in the public sphere while maintaining traditional leadership roles within the family and in religious practices as a form of negotiation between gender justice and religious norms. On the other hand, some politicians demonstrate a progressive stance by critically addressing patriarchal culture and policies that reproduce gender inequality. The political communication of Muslim women politicians is conducted persuasively, grounded in religious values, emotional proximity, and cultural as well as digital practices. The use of social media expands the reach of gender issues, although it remains overshadowed by gender bias and personal attacks. Strengthening the political role of Muslim women requires not only structural approaches but also cultural and communicative strategies to ensure that gender equality is realized in a more substantive and sustainable manner within local political life

.Keywords: Political Communication; Gender Equality; Muslim Women; Riau Islands.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya pada sekalian alam dan juga telah memberikan hidayah bagi manusia dengan kehendaknya. Serta Sholawat salam semoga senantiasa tercurah pada kekasihnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Tesis yang berjudul, **Komunikasi Politik Perempuan Muslim dalam Membangun Kesetaraan Gender Studi Kasus DPRD Provinsi Kepulauan Riau**, ini telah selesai ditulis dalam waktu yang relatif panjang. Penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat menghasilkan karya ilmiah yang memiliki kualitas tertentu, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sosial dalam program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis berharap, karya tulis ini mencapai prestasi akademik yang optimal, juga dapat memberikan peluang kepada Para Politisi Perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima

kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di kampus ini serta mendukung mahasiswa
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A., beserta jajaran, serta Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Dr. Abdul Rozak, M.Pd., dan Sekretaris Program Studi, Dr. Khadiq, S.Ag., M.Hum., juga pada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Penyiaran Islam, atas dukungan selama proses perkuliahan.
3. Dosen penasehat akademik, Dr. Khadiq, S.Ag., M.Hum., yang telah memberikan motivasi, arahan, dan dorongan semangat yang sangat berarti selama masa studi.

4. Dosen pembimbing tesis saya Prof. Alimatul Qibtiyah, M.Si, M.A.Ph.D., yang banyak memberikan arahan dan ruang untuk saya bisa menuangkan kemampuan akademik dalam mengelaborasi antar ilmu komunikasi umum dan islami berbasis Gender, kiranya ilmu dan waktu yang beliau beri pada saya dapat menjadi bekal untuk bisa melanjutkan kejenjang Doktoral.
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sekwan, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Para narasumber politis perempuan Ibu Ismiyati, Ibu Ririn Warsiti, Ibu Dewi Kumalasari, Ibu Rohani, Ibu Mesrawati Tampubolon, Ibu Clara Claudia Pratiwi Lase, tim protokol DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan adanya beliau-beliau telah menyempatkan interaksi pada peneliti terkait penelitian tentang komunikasi politik dalam membangun kesetaraan gender.
6. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
7. Penghargaan khusus penulis sampaikan kepada rekan-rekan Angkatan, saudara/I, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau yang telah membantu melalui diskusi dan dukungan selama proses penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap karya ini dapat menjadi langkah awal yang bermanfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam konteks penguatan peran politik perempuan Islam di Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu dan meridhoi tesis ini.

Yogyakarta, 11 Februari 2026

Rajabbul Amin, S.Sos

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Kajian Teori.....	27
1. Gender dan Pendekatan Islam dalam Politik	27
2. Teori Representasi dan Kesenjangan Gender	31
3. Komunikasi Politik.....	34
4. Teori Konvergensi simbolik	39
5. Teori Computer Mediated Communication (CMC).....	43
G. Metodologi Penelitian.....	48
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
2. Fokus Penelitian	51
3. Teknik Pengumpulan Data	52
4. Teknik Validasi Data.....	55
5. Teknik Analisis Data	56
F. Sistematika Pembahasan	57
BAB II	60

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
A. Profil Provinsi Kepulauan Riau	60
B. Profil DPRD Provinsi Kepulauan Riau	65
1. Daerah Pemilihan	66
2. Struktur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	71
3. Struktur Komisi DPRD Kepulauan Riau	73
4. Komposisi Perwakilan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau ..	74
BAB III	79
Komunikasi Politik Perempuan dalam Membangun Kesetaraan Gender	79
A. Pendekatan Pemahaman Gender dalam Islam	79
B. Komunikasi Politik Politik Perempuan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	102
C. Strategi Komunikasi Politik Politik Perempuan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	129
D. Sintesis Temuan Penelitian	151
1. Keterhubungan Pemahaman Gender dan Komunikasi Politik	151
2. Pola Komunikasi dan Peran Politik Perempuan dalam Membangun Kesetaraan Gender	162
3. Masa Depan Perempuan di Dunia Politik	170
BAB IV	178
PENUTUP	178
A. Kesimpulan	178
B. Saran	180
C. Keterbatasan Penelitian	181
Daftar Pustaka	183
LAMPIRAN	190
LAMPIRAN SURVEY	190
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	206
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	208

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Asumsi Teori SCT	41
Gambar 1. 2 Bagan Kerangka Berpikir	47
Gambar 3. 1 Hasil Survey peran gender di rumah dan tempat kerja	84
Gambar 3. 2 Hasil Survey status perempuan	84
Gambar 3. 3 Hasil Survey hak perempuan	85
Gambar 3. 4 Hasil Survey Hak Waris	87
Gambar 3. 5 Hasil Survey Tentang Penciptaan Perempuan	88
Gambar 3. 6 Hasil Survey perempuan ceramah Ramadhan	89
Gambar 3. 7 Hasil Survey posisi perempuan pada pendidikan tinggi	91
Gambar 3. 8 Hasil Survey keterlibatan perempuan pada keputusan politik	91
Gambar 3. 9 Hasil survey peran perempuan di media sosial	92
Gambar 3. 10 Kegiatan majelis taklim di masjid abbas thalib	105
Gambar 3. 11 Kegiatan Seminar Kepemimpinan Perempuan	106
Gambar 3. 12 Kegiatan Seminar Pendidikan Guru PAUD	108
Gambar 3. 13 Salah satu postingan media sosial politisi tentang perempuan	131
Gambar 3. 14 Salah satu postingan media sosial politisi tentang pelatihan tata boga	132
Gambar 3. 15 Salah satu postingan media sosial politisi tentang dakwah	135
Gambar 3. 16 Salah satu postingan media sosial politisi tentang dakwah	136
Gambar 3.17 Salah satu postingan media sosial politisi saat berkunjung di pulau penyengat	139
Gambar 3. 18 Salah satu postingan media sosial politisi saat berkunjung ke pulau-pulau	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2. 1 Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kepulauan Riau.....	67
Tabel 2. 2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	75
Tabel 3. 1 Hasil Skor Angket	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan politik perempuan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, ditandai dengan hadirnya tokoh-tokoh seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, Siti Walidah hingga peristiwa penting kongres perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 yang menegaskan aspirasi perempuan dalam pendidikan, keluarga dan politik.¹ Setelah era kemerdekaan, Maria Ulfah Santoso berhasil menembus kabinet sebagai Menteri perempuan pertama.² Sementara itu, Nani Soewondo memperjuangkan lahirnya UU perkawinan 1974 yang melindungi hak perempuan.³ Meski demikian, pada orde baru dengan ideologi “ibuisme” justru membatasi perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki. Setelah reformasi, kebijakan afirmasi melalui UU No 10/2008 menghadirkan kuota 30 % bagi perempuan dalam daftar calon legislatif.⁴

Saat ini, realitas menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi kuota perempuan belum sepenuhnya efektif. Pada pemilu 2019 keterwakilan perempuan di DPR RI hanya 20,5% dan pada Pemilu 2024 naik sedikit menjadi 21,9 %, hal

¹ Dinar Dewi Kania, *Delusi Kesetaraan Gender Tinjauan Kritis Konsep Gender* (Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018), 17–18.

² Mansyur Amin, “Wanita Itu Orang Banten,” *Tempo.Com*, 1977, 16.

³ Ahmad Fatikhul Amin Abdullah, *Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Madura: IAIN Maduura Press, 2021), 71.

⁴ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 43.

ini masih jauh dari ambang batas minimal 30%.⁵ Fenomena ini membuktikan bahwa kuota semata tidak cukup, sebab keterpilihan perempuan dalam politik dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap modal politik, jaringan elit serta strategi komunikasi yang dijalankan.⁶

Kondisi ini juga terjadi pada keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. Dari 45 kursi DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2024-2029, hanya 6 orang wakil perempuan.⁷ Fakta ini menandakan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan besar untuk menembus ruang politik formal. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya budaya patriarki yang masih menganggap politik sebagai domain laki-laki dan mereduksi peran perempuan pada ranah domestic, serta adanya krisis kepercayaan di kalangan para pemilih perempuan itu sendiri sebagaimana diungkapkan penelitian nazaki. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap esensi kesetaraan gender menyebabkan keterpilihan perempuan sering kali hanya dipandang sebagai upaya administratif untuk memenuhi kuota 30% daripada sebuah representasi substantif, sehingga tantangan geografis kepulauan yang menghambat akses informasi, kian

⁵ Fransin Kontu and Stefanus Pesak, "Kuota 30 % Perempuan Di Parlemen : Implementasi Dan Efektivitasnya Di Indonesia," *PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy* 02, no. 01 (2025): 64–73, <https://journal.papsel.org/index.php/JHP/index%0AKuota>.

⁶ Selvia Adriani and Siti Tiara Maulia, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik," *Journal of Practice Learning and Educational* 4, no. 2 (2024): 135, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>.

⁷ Ogen, "KPU Tetapkan 45 Anggota DPRD Kepri, Terpilih Ini Daftarnya," *antaranews.com*, 2024.

memperlebar jarak antara regulasi afirmasi dengan realitas politik di lapangan.⁸

Realitas sosial-politik di Kepulauan Riau sesungguhnya menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah hal baru, sebab wilayah ini memiliki jejak historis kuat terkait peran perempuan dalam ruang publik dan kekuasaan. Kota Tanjungpinang pernah dipimpin oleh seorang perempuan selama kurang lebih 16 tahun, sebuah capaian yang menegaskan adanya legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan di tingkat lokal. Bahkan jauh sebelum itu, dalam konteks Kerajaan Riau-Lingga, perempuan-perempuan istana telah memainkan peran strategis dalam menjaga otoritas adat, diplomasi kultural, serta pengambilan keputusan sosial-politik. Fakta historis ini memperlihatkan bahwa tradisi Melayu Kepulauan Riau sejatinya tidak sepenuhnya menutup ruang politik bagi perempuan, sehingga anggapan bahwa politik adalah domain eksklusif laki-laki menjadi narasi yang historis.⁹ Oleh karena itu, rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau saat ini dapat dipahami sebagai dampak dari menguatnya struktur politik modern yang maskulin dan patriarki, bukan karena ketiadaan kapasitas, pengalaman, maupun teladan kepemimpinan perempuan di tingkat lokal.

⁸ Nazaki and Nur A Dwi Putri, “Keterwakilan Politik Perempuan Kepulauan (Harapan Yang Tidak Kunjung Tercapai),” *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 05, no. 01 (2020): 112–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2684>.

⁹ Rajabbul Amin, “Para Perempuan Hebat Di Kepulauan Riau, Dari Istana Melayu Hingga Ruang Publik,” *Indonesiana by tempo*, 2026, <https://www.indonesiana.id/read/190838/para-perempuan-hebat-di-kepulauan-riau-dari-istana-melayu-hingga-ruang-publik>.

Kehadiran anggota DPRD perempuan muslim di Kepulauan Riau menunjukkan dinamika baru. Berdasarkan observasi peneliti para politisi perempuan tidak hanya berperan sebagai legislator, tetapi juga sebagai komunikator politik yang menyatukan peran politik dengan dakwah Islam. Misalnya, Ismiyati dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) aktif menyuarakan isu perempuan dan keluarga melalui media sosial dan dakwah secara langsung. Selanjutnya, Dewi Kumalasari dari perwakilan Partai Golongan Karya (GOLKAR) menjadikan majelis taklim sebagai media dakwah politik sekaligus membangun pengaruh sosial berbasis komunitas Muslimah. Sedangkan Ririn Warsiti dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) memanfaatkan platform digital untuk memperjuangkan isu kesetaraan gender dan representasi perempuan.

Peran mereka menegaskan bahwa komunikasi politik perempuan muslim tidak hanya berlangsung di gedung parlemen saja, tetapi juga di ruang dakwah baik fisik maupun digital. Media sosial memberi peluang bagi mereka untuk memperluas jangkauan pesan, sekaligus melahirkan tantangan berupa bias gender atau stereotip hingga penghinaan terhadap penampilan fisik daripada ide.¹⁰ Demikian pula pada majelis taklim yang sering diasosiasikan dengan ruang keagamaan tradisional menjadi arena politik kultural yang memperkuat posisi perempuan.

¹⁰ Basit Lutfi, *Lensa Gender Di Mata Media Massa: Meta Analisis Politisi Perempuan* (Medan: UMSU PRESS, 2022), 117.

Aristoteles, sebagaimana dikutip Yusro, menyatakan bahwa “*man is by nature a political animal*” manusia pada dasarnya makhluk politik yang hanya dapat mencapai kesempurnaan hidup dalam kehidupan bersama (polis).¹¹ Namun, istilah “*man*” dalam kutipan itu tidak netral secara gender karena merepresentasikan laki-laki sebagai simbol universal manusia. Hal ini menunjukkan adanya bias patriarki dalam pandangan klasik Aristoteles yang perlu dikritisi. Jika diterjemahkan sebagai “*human being*”, maka konsep makhluk politik seharusnya mencakup semua manusia, termasuk perempuan, yang juga memiliki peran dan kapasitas rasional dalam ruang publik. Oleh karena itu, politik harus dipahami secara inklusif sebagai ruang partisipasi bersama, bukan milik satu jenis kelamin. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Martha Nussbaum yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa membedakan gender, berhak mengembangkan potensi politik dan sosialnya secara setara¹².

Peran dan status perempuan dalam masyarakat sejatinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, masih banyak perempuan yang belum memahami hak-haknya, sehingga diskriminasi gender dalam politik Indonesia terus berlangsung.¹³ Mayoritas perempuan kurang menyadari

¹¹ Safawardi Yusro, Huda Miftahul, and Karno, *Cara Kerja Ilmu -Ilmu*, ed. Abd. Muid (Jakarta: PTIQ PRESS, 2018), 97.

¹² Susan Wolf, “Martha C. Nussbaum: Human Capabilities, Female Human Beings,” ed. Martha C Nussbaum and Jonathan Glover, *Women, Culture, and Development: A Study of Human Capabilities* (Oxford University Press, November 30, 1995), 105, <https://doi.org/10.1093/0198289642.003.0004>.

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Tranformasi Sosial*, Keenam Belas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 11.

keterlibatan mereka dalam politik dan pengambilan keputusan, akibat adanya prasangka yang meremehkan posisi perempuan.¹⁴

Perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif di semua bidang, termasuk politik yang sangat mempengaruhi kebijakan. Menurut Myron Wiener, sebagaimana dikutip dari Husein, partisipasi politik bersifat sukarela dan didorong oleh komunitas tanpa paksaan.¹⁵ Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan merupakan bentuk perjuangan kolektif untuk menggali dan mengoptimalkan potensi mereka dalam pembangunan bangsa. Dukungan keluarga (*support system*), utamanya suami, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi perempuan yang terlibat aktif di dunia politik.¹⁶

Perjuangan perempuan dalam memperoleh ruang politik merupakan salah satu isu penting dalam sejarah demokrasi modern. Sejak abad ke-19, gerakan feminisme global memperjuangkan hak-hak dasar perempuan terutama hak politik.¹⁷ Gerakan suffragette di Inggris yang dipimpin Emmeline Pankhurst dan perjuangan Susan B Anthony di Amerika Serikat menjadi simbol ketabahan perempuan melawan dominasi politik maskulin.¹⁸ Perjuangan itu membuahkan hasil saat negara Selandia Baru menjadi negara pertama di

¹⁴ Kania, *Delusi Kesetaraan Gender Tinjauan Kritis Konsep Gender*, 77.

¹⁵ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2007), 60.

¹⁶ Alimatul Qibtiyah, "Peran Suami Di Balik Keberhasilan Politikus Perempuan," *Suara Aisyah*, 2019.

¹⁷ Margaret Walters, *Feminisme Pengantar Untuk Pemula Terj. Devi Santi Ariani* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 43.

¹⁸ Rini Hartono, "Sejarah Suffragette Dan Perjuangan Hak Pilih Perempuan," *Berdikari Online*, 2022, <https://www.berdikarionline.com/mengenal-suffragette-dalam-sejarah-perjuangan-hak-pilih-perempuan/>.

dunia yang memberikan hak pilih perempuan pada tahun 1893¹⁹. Sejak saat itu, perjuangan kaum feminisme untuk memperoleh hak pilih telah meluas ke berbagai negara di Eropa, Asia hingga Afrika.

Dalam perspektif politik Islam hal ini menjadi relevan. Islam menekankan nilai-nilai *shura* (musyawarah), *adl* (Keadilan) dan *Amanah* (kepercayaan) menegaskan bahwa kepemimpinan tidak terbatas pada gender melainkan berdasarkan kapasitas.²⁰ Sejarah Islam mencatat tokoh-tokoh perempuan seperti Aisyah R.A istri Rasulullah dan Syifa binti Abdullah yang menjadi penasihat Umar bin Khattab. Namun, dalam praktik kontemporer di Indonesia, tafsir yang sempit terhadap ajaran Islam seringkali justru membatasi ruang politik perempuan muslim sebagai komunikator politik.

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas terdapat beberapa kesenjangan utama yang perlu diteliti. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara kuota politik yang dijamin oleh regulasi dengan keterwakilan nyata perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, masih kuatnya budaya patriarki dan stereotip gender yang mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Ketiga perlunya pemahaman mendalam tentang peran anggota DPRD perempuan muslim memanfaatkan media sosial, dakwah dan komunikasi politik islam untuk memperjuangkan kesetaraan

¹⁹ Raewyn Dalziel, "The Colonial Helpmeet: Women's Role and the Vote in Nineteenth-Century New Zealand," *New Zealand Journal of History* 11, no. 2 (1977): 112–113, <https://muse.jhu.edu/article/870217>.

²⁰ Superman, "Konsep Syura Dalam Politik Islam Menurut Al- Qur ' An," *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, No. 2 (2024): 230, Http://Sophisticated.Fusa.Uinjambi.Ac.Id/Index.Php/Ppi_Uinjambi_2022/Article/View/44/27.

gender. Oleh karena itu, penelitian tentang komunikasi politik muslim dalam membangun kesetaraan gender, khususnya pada politisi perempuan di DPRD Kepulauan Riau menjadi penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendekatan pemahaman gender dalam Islam para politisi Perempuan Muslim di DPRD Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana komunikasi politik politisi perempuan muslim di DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun kesetaraan gender?
3. Bagaimana strategi komunikasi politisi perempuan muslim DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam memanfaatkan media sosial dan forum dakwah untuk mensosialisasikan isu kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji pemahaman nilai-nilai gender dalam Islam terhadap praktik komunikasi politik perempuan muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender di masyarakat Kepulauan Riau.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD perempuan muslim di Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun narasi kesetaraan gender.
3. Untuk menganalisis strategi komunikasi anggota DPRD perempuan muslim melalui media sosial dan forum dakwah dalam mensosialisasikan isu kesetaraan gender.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang komunikasi politik berbasis gender, khususnya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam politik digital di Indonesia.
2. Manfaat Praktis: penelitian ini memberikan masukan bagi politisi perempuan, tentang strategi komunikasi politik yang efektif, serta menjadi rujukan bagi partai politik dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan sensitif gender, baik di partai Islam, Nasionalis-Religius maupun nasionalis.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang politik, perempuan dan gender telah banyak dilakukan antara lain: Ikrom²¹, Halipah²², Khoir²³, Astuti²⁴, Fauzi²⁵, Farhansyah²⁶,

²¹ Ikrom Mohammad, "Strategi Komunikasi Pimpinan Wanita Islam Alkhairadalam Memperkuat Peran Politik Perempuan Muslim Dikota Palu Di Kota Palu 2019-2024 M" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

²² Halipah, "Perwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif(Studi Kasus Keberadaan Anggotalegislatif Perempuan Di Dewanperwakilan Rakyat Daerah Kabupatenpenajam Paser Utara Periode 2019 – 2024)" (Universitas Fajar, 2024).

²³ Miftahul Khoir, "Komunikasi Politik Bupati Bantul Sebagai Juru Kampanye Pilpres 2024: Perspektif Opini Publik Menurut Dan Nimmo Dan Etika Politik Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

²⁴ Melsye Kurnia Astuti, "Implikasi Partisipasi Perempuan Dalampolitik Di Era Digital Pada Kriteriamemilih Pemimpin(Kajian Ma'anil Hadis)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

²⁵ Nanda Aniza Fauzi, "Partisipasi Dan Peran Politik Perempuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

²⁶ Illham Farhansyah, "Komunikasi Politik Politisi Perempuan 'Studi Deskriptif Integrated Marketin Communication Pada Politisi Perempuan Anggota Dprd Kab Garut 2019-2024'" (Universitas Garut, 2024).

Windarshiharly²⁷, Nur²⁸, Khadijah²⁹, Setyawati³⁰, Istiqlal³¹, Winata³², Irmayanti³³, Busungi³⁴, Saldi³⁵, Adriani³⁶, Pamungkas³⁷, Ehipana³⁸, Ayu³⁹ dan Hasanah⁴⁰.

²⁷ Windarsiharly, "Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Implementation" (Universitas Hasanudin, 2022).

²⁸ Nur Lisma, "Peran Media Sosial Dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu: Analisis Media Sosial Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Di Kota Bandung" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

²⁹ Siti Khadijah And Fakultas Komunikasi, "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Kiprah Dakwah Partai Keadilan Sejahtera," *Jorcs The Journal Of Religion And Communication Studies* 1, No. 1 (2024): 1–12.

³⁰ Titin Setiawati And Vilya Dwi Agustini, "Komunikasi Dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7, No. 1 (2024): 162–73, <https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3751>.

³¹ Farhan Istiqlal, "Analisis Strategi Perempuan Dalam Mendapatkan Kepemimpinan Politik Di Sumatera Barat" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024).

³² Tirta Pandu Winata dkk., "Kebijakan Politik Afirmatif Dan Problematika Representasi Perempuan Di Parlemen Lokal Pada DPRD Kabupaten Wonosobo," *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 20, No. 1 (2024): 77–98, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/index>.

³³ Irmayanti, "Isu Ketidakadilan Gender Terhadap Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus Pada Partai PDIP Dan Partai Nasdem)" (Universitas Nasional, 2024).

³⁴ Faini Basuungi And Andi Yusuf Katili, "Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Provinsi Gorontalo," *Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial Dan Politik* 1, No. 02 (2024): 101–9, <https://doi.org/10.69623/j-emspol.v1i2.11>.

³⁵ Wawan Saldi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Politisi Perempuan Dprd Kabupaten Mamasa" (Universitas Sulawesi Barat, 2025).

³⁶ Adriani And Maulia, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik."

³⁷ Gopin Pamungkas And Intan Agristin, "Kesenjangan Gender : Perempuan Dalam Memperoleh Hak Politik," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, No. 1 (2024): 507–11, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0a>.

³⁸ Angelita Epiphania Rnh, Marlan Hutahaean, And Artha Lumban Tobing, "Perempuan Dan Patriarki Politik : Pola Violence Against Women In Politics Dan Dinamika Politik Di Dpr Ri Periode 2014-2019 Hingga 2024-2029," *Joulage: Journal Of Laguna Geography* 04, No. 01 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.52562/joulage.v4i1.1532> Journal Of Laguna Geography <https://journal.moripublishing.com/index.php/joulage> |.

³⁹ Rahma Syakira Ayu Et Al., "Dampak Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan Di Pdi-P : Studi Kasus Mekanisme Pemilu Dan Strategi Partai Dalam Pemenuhan Kuota Gender," *Jurnal Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, No. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2398>.

⁴⁰ Rizka Luluatul Hasanah Et Al., "Representasi Perempuan Di Parlemen : Studi Perbandingan Keberhasilan Kuota Gender Di Indonesia," *Kapalamada: Jurnal Multidisipliner* 4, No. 02 (2025): 218–30, <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v4i02.1566>.

Penelitian Ikrom, membahas tentang strategi komunikasi pimpinan wanita islam al-khairat di kota palu. Hal itu dilatarbelakangi oleh komunikasi pimpinan organisasi perempuan Islam di Kota Palu, dalam membangun langkah politiknya yang selama ini terhalangi oleh norma-norma dalam entitas lembaga. Studi ini menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural, Teori feminisme dengan pendekatan fenomenologi. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan keagamaan dapat membuka ruang kaderisasi politik bagi perempuan muslim, meskipun masih menghadapi hambatan budaya internal. Penelitian ini menekankan peran organisasi keagamaan sebagai basis politik perempuan bukan pada praktik legislatif formal⁴¹.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Halipah, mengkaji tentang peran anggota DPRD perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yang terjadi pada peran dan fungsi perempuan dalam parlemen, serta pendukung dan hambatan perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini menggunakan teori mandat dan partisipasi politik dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menekankan fungsi representasi perempuan dalam menjembatani aspirasi masyarakat, namun peneliti menemukan kendala yang

⁴¹ Muhammad Ikrom, Strategi Komunikasi Pimpinan Wanita Islam Alkhairat dalam Memperkuat Peran Politik Perempuan Muslim Di Kota Palu Di Kota Palu 2019-2024 M” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

signifikan berupa budaya patriarki dan keterbatasan akses perempuan pada pengambilan keputusan⁴².

Selanjutnya Studi oleh Khoir, yang meneliti tentang komunikasi politik bupati bantul dalam pilpres 2024, dengan fokus pada etika politik islam dan respon opini publik. permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, keterlibatan Bupati Bantul memunculkan pro dan kontra pada berbagai kalangan masyarakat karena keputusan menjadi juru kampanye dianggap tidak bias. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik Nimmo serta etika islam dengan pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menegaskan adanya ketegangan antara kepentingan politik elektoral dengan nilai etika dalam islam. Fokus penelitian ini adalah aktor eksekutif dan komunikasi kampanye.⁴³

Selanjutnya penelitian oleh Astuti, yang mengkaji polemik kepemimpinan perempuan melalui pendekatan ma'ani al hadis. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini kepemimpinan perempuan selalu menjadi polemik, padahal sandaran hadis yang digunakan adalah teks hadis yang sama. Penelitian ini menggunakan teori kesetaraan gender dengan metode studi kepustakaan dengan pendekatan tematik hadis. Penelitiannya mengungkap

⁴² Halipah, "Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus Keberadaan Anggotalegislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024)" (Universitas Fajar, 2024).

⁴³ Miftahul Khoir, "Komunikasi Politik Bupati Bantul Sebagai Juru Kampanye Pilpres 2024: Perspektif Opini Publik Menurut Dan Nimmo dan Etika Politik Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

perbedaan tafsir antara kalangan tekstualis yang cenderung membatasi kepemimpinan perempuan dan kontekstualitas yang lebih memberi ruang.⁴⁴

Penelitian selanjutnya oleh Fauzi, membahas tentang partisipasi politik perempuan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan bahwa wanita tidak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dan mempunyai peran politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik, dengan pendekatan studi pustaka dengan penelitian normatif. Penelitiannya membedakan antara konsep partisipasi dan peran politik perempuan, dengan hasil bahwa hukum seharusnya membuka ruang yang setara bagi politisi perempuan⁴⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Farhansyah, meneliti tentang komunikasi politik anggota DPRD perempuan di Kabupaten Garut dengan perspektif Integrated Marketing Communication. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif IMC. Peneliti menemukan bahwa hambatan terbesar perempuan bukanlah keterbatasan biologis, melainkan konstruksi sosial gender yang membatasi ruang gerak politik politisi perempuan.⁴⁶

Penelitian oleh Windarshiharly, meneliti implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Sulawesi Selatan. Penelitian ini

⁴⁴ Melsye Kurnia Astuti, "Implikasi Partisipasi Perempuan dalam Politik di Era Digital Pada Kriteria Memilih Pemimpin (Kajian Ma'anil Hadis)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

⁴⁵ Nanda Aniza Fauzi, "Partisipasi Dan Peran Politik Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

⁴⁶ Illham Farhansyah, "Komunikasi Politik Politisi Perempuan 'Studi Deskriptif Integrated Marketing Communication pada Politisi Perempuan Anggota DPRD Kab Garut 2019-2024'" (Universitas Garut, 2024).

dilatarbelakangi oleh Partai politik memainkan peran penting dalam mempersiapkan perempuan untuk terlibat pada pemilihan legislatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme dan teori keadilan dengan pendekatan empiris. Penelitiannya menunjukkan lemahnya mekanisme internal partai dalam mendukung perempuan, sehingga keterwakilan hanya formalitas. Fokusnya adalah pada kebijakan afirmasi struktural partai politik.⁴⁷

Penelitian oleh Nur, meneliti peran media sosial dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Bandung. Permasalahan yang terjadi dikarenakan minimnya partisipasi perempuan dalam media dapat menyebabkan kurangnya isu-isu politik terkait perempuan itu sendiri, sehingga masyarakat akan lebih sedikit menerima informasi mengenai partisipasi perempuan dibandingkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori partisipasi politik perempuan, feminisme dan komunikasi politik dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan media sosial membuka ruang aspirasi politik dan memperkuat keterlibatan perempuan dalam diskursus publik.⁴⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Khadijah, yang meneliti partisipasi politik perempuan PKS dalam kiprah berdakwah, bahwa peneliti menemukan bahwa perempuan PKS efektif memanfaatkan kedekatan emosional dan sosial untuk

⁴⁷ Windarsiharly, "Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan pada Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Implementation" (Universitas Hasanudin, 2022).

⁴⁸ Nur Lisma, "Peran Media Sosial dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu: Analisis Media Sosial dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kota Bandung" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

menjawab kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang terjadi bahwa perempuan dianggap lemah atau tidak sempurna karena perbedaan biologis telah lama menjadi bagian dari stereotip gender yang tidak akurat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Citizen, media effect dan partisipasi publik. Hasil menunjukkan bahwa Partisipasi aktif politik perempuan PKS efektif dalam mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik perempuan ditunjukkan melalui sarana sebagai pembicara/pelatih, perempuan, menjadi influencer partai.⁴⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawati, meneliti tentang komunikasi politik perempuan dalam politik elektoral, dengan temuan bahwa hambatan terbesar yang terjadi dikarenakan ada konflik antara peran domestik dan publik. permasalahan yang terjadi keterlibatan perempuan dalam politik elektoral dengan berbagai cara, mengungkap masalah yang dihadapi, dan strategi komunikasi yang diterapkan perempuan calon anggota legislatif untuk menarik suara pemilih. Dengan menggunakan teori kesetaraan gender dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menekankan peran ganda yang terjadi pada perempuan.⁵⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Istiqbal, meneliti strategi perempuan dalam memperoleh kepemimpinan politik di Sumatera Barat. Peneliti menemukan stereotip gender menjadi hambatan utama, sementara tokoh masyarakat dan

⁴⁹ Siti Khadijah and Fakultas Komunikasi, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Kiprah Dakwah Partai Keadilan Sejahtera," *JORCS The Journal of Religion and Communication Studies* 1, no. 1 (2024): 1–12.

⁵⁰ Titin Setiawati and Vilya Dwi Agustini, "Komunikasi dan Partisipasi Perempuan dalam Politik Elektoral," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 162–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3751>.

media menjadi strategi pendukung. Permasalahan yang terjadi Perempuan masih menghadapi hambatan signifikan dalam mencapai posisi kepemimpinan politik. Penelitian ini menggunakan teori marketing politik dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini fokus pada strategi sebelum perempuan terpilih dalam memperoleh kepemimpinan.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Tirta Pandu Winata, meneliti tentang kebijakan afirmasi gender di DPRD Wonosobo dengan fokus pada implementasi kuota perempuan dalam politik lokal. Peneliti menggunakan teori kesetaraan gender dan feminisme dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan afirmasi, faktor struktural seperti minimnya pendanaan politik, lemahnya dukungan partai, serta bias budaya masyarakat masih menjadi penghambat utama.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti, menyoroti tentang isu ketidakadilan gender terhadap calon legislatif perempuan pada pemilu 2019. Permasalahan yang terjadi meskipun kebijakan *affirmative action* telah diterapkan, realitas menunjukkan pemilu legislatif 2019 menghadapi dinamika kompleks terkait isu ketidakadilan yang menargetkan calon legislatif perempuan. Peneliti menggunakan feminisme poskolonial, dan komunikasi politik dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pendekatan ketidakadilan gender. Peneliti menemukan bahwa hambatan

⁵¹ Farhan Istiqlal, "Analisis Strategi Perempuan dalam Mendapatkan Kepemimpinan Politik di Sumatera Barat" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024).

⁵² Tirta Pandu Winata dkk., "Kebijakan Politik Afirmatif dan Problematika Representasi Perempuan di Parlemen Lokal Pada DPRD Kabupaten Wonosobo," *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 20, no. 1 (2024): 77–98, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>.

utama terletak pada relasi kuasa patriarki di internal partai politik, rendahnya literasi politik perempuan, serta minimnya dukungan dari jaringan politik yang mampan.⁵³

Penelitian yang dilakukan oleh Busungi, meneliti tentang Komunikasi Politik perempuan di Gorontalo, bahwa legislator perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan daerah, namun penelitian ini, belum menyentuh peran Anggota DPRD perempuan dalam memanfaatkan ruang-ruang media sosial dan dakwah dalam strategi komunikasi politiknya. Dengan pendekatan teori feminisme menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo, mendapat dukungan dari kaum mayoritas, dan memberikan kemajuan jumlah kursi yang ada sebelumnya, sehingga perjuangan hak-hak perempuan mendapat perhatian yang lebih baik,⁵⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Saldi, meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan di DPRD Mamasa. Permasalahan yang terjadi masih banyak masyarakat yang meragukan politisi perempuan dalam setiap kontestasi pemilu, pilkada dan pileg. Teori yang digunakan dalam penelitiannya yakni teori persepsi dan gender dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menemukan bahwa adanya penilaian positif terhadap keterlibatan perempuan dalam politik lokal.⁵⁵

⁵³ Irmayanti, "Isu Ketidakadilan Gender Terhadap Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus Pada Partai PDIP Dan Partai Nasdem)" (Universitas Nasional, 2024).

⁵⁴ Faini Basuungi dan Andi Yusuf Katili, "Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo," *Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 02 (2024): 101–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.69623/j-emspol.v1i2.11>.

⁵⁵ Saldi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Politisi Perempuan DPRD Kabupaten Mamasa."

Penelitian yang dilakukan oleh Adriani, meneliti tentang partisipasi perempuan dalam politik. Peneliti menyoroti rendahnya partisipasi politik perempuan karena masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pandangan tradisional yang merendahkan peran perempuan dalam politik. Peneliti menggunakan teori komunikasi gender, dan komunikasi politik serta dengan pendekatan kajian literatur. Peneliti menyoroti tentang pendidikan politik bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran Perempuan atas hak-haknya.⁵⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, tentang kesenjangan gender dalam memperoleh hak politik. peneliti menemukan bahwa patriarki menjadi hambatan struktural paling kuat bagi Perempuan untuk masuk ke ranah politik informal. Peneliti menggunakan teori kesetaraan gender dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak politik perempuan masih sangat rendah dibandingkan dengan hak politik laki-laki karena dianggap belum mampu untuk bersaing dalam beberapa hal⁵⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Epiphania, peneliti menyoroti fenomena Violence against women in politics dan Dinamika Politik di DPR RI periode 2014-2019 hingga 2024-2029, peneliti menyoroti Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk sistem patriarki yang membatasi peran mereka dalam politik. Teori yang digunakan peneliti adalah kesetaraan gender dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian sistem patriarki dan kekerasan politik masih menjadi hambatan

⁵⁶ Adriani and Maulia, "Partisipasi Perempuan dalam Politik."

⁵⁷ Pamungkas and Agristin, "Kesenjangan Gender : Perempuan Dalam Memperoleh Hak Politik."

signifikan bagi partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini terlihat dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik (VAWP) yang telah dipaparkan.⁵⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu, meneliti dampak sistem pemilu terhadap keterwakilan politik perempuan di PDIP Studi Kasus Mekanisme Pemilu dan Strategi Partai dalam Pemenuhan Kuota Gender dengan temuan bahwa sistem proporsional terbuka seringkali merugikan perempuan dikarenakan kompetisi lebih keras dan biaya politik nya lebih tinggi. Peneliti menggunakan teori Kuota, gender dan afirmasi politik dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka membuat kandidat dalam satu partai bersaing ketat, yang seringkali menghalangi perempuan untuk terpilih. PDI-P memenuhi kuota gender dengan menggunakan metode seperti kaderisasi melalui organisasi sayap partai dan sistem zip dalam daftar ⁵⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, tentang representasi politik perempuan studi perbandingan keberhasilan kuota gender di Indonesia dan Swedia. Permasalahan yang terjadi Stereotip gender, marginalisasi dalam partai politik, serta minimnya dukungan struktural merupakan tantangan yang

⁵⁸ Angelita Epiphania Rnh, Marlan Hutahaean, dan Artha Lumban Tobing, "Perempuan dan Patriarki Politik : Pola Violence Against Women in Politics dan Dinamika Politik di DPR RI Periode 2014-2019 Hingga 2024-2029," *JouLaGe: Journal of Laguna Geography* 04, no. 01 (2025): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.52562/joulage.v4i1.1532> *Journal of Laguna Geography* <https://journal.moripublishing.com/index.php/joulage> |.

⁵⁹ Rahma Syakira Ayu dkk., "Dampak Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan di PDI-P : Studi Kasus Mekanisme Pemilu Dan Strategi Partai dalam Pemenuhan Kuota Gender," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2398>.

membuat perempuan sulit untuk masuk dan bertahan di dunia politik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah gender dan komunikasi politik dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menunjukkan bahwa di Indonesia keterwakilan perempuan masih jauh tertinggal karena hambatan sistem patriarki, sementara di Swedia dukungan struktural justru lebih kuat.⁶⁰

Tabel 1. 1
Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Dan Tahun	Masalah	Teori	Metode	Hasil
1	Mohammad Ikrom, <i>Strategi Komunikasi Pimpinan Wanita Islam Al-Khaira dalam Memperkuat Peran Politik Perempuan Muslim di Kota Palu 2019 - 2024 M (2025)</i>	komunikasi pimpinan organisasi perempuan Islam di Kota Palu yang menjadi tempat perempuan muslim membangun langkah politiknya yang selama ini terhalangi oleh norma-norma dalam entitas lembaga	Teori Fungsionalisme Struktural, Teori Komunikasi Harold Lasswell, Teori feminisme	Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi	Strategi komunikasi Pimpinan WIA memperkuat peran politik perempuan internal WIA yang selama ini dihalangi oleh norma-norma dalam entitas lembaga, telah mampu memberdayakan kadernya melalui kepemimpinan di organisasi sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan dan bertransformasi dalam politik.
2	Halipah, "Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Utara Periode 2019–2024)" (2024)	Peran dan fungsi perempuan dalam parlementer, serta pendukung dan hambatan perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Paser Utara	Teori mandat, Teori partisipasi politik,	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Peran perempuan di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat tentunya mewujudkan aspirasi masyarakat baik dari kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan.
3	Miftahul Khoir, "Komunikasi Politik Bupati Bantul Sebagai Juru Kampanye Pilpres 2024: Perspektif	Keterlibatan Bupati Bantul memunculkan pro dan kontra pada berbagai kalangan masyarakat karena	Komunikasi Politik dan nimmo etika politik islam,	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	bahwa ada pro dan kontra dari masyarakat karena keputusan seorang bupati untuk menjadi juru kampanye.

⁶⁰ Rizka Luluatul Hasanah Et Al., "Representasi Perempuan di Parlemen : Studi Perbandingan Keberhasilan Kuota Gender di Indonesia," *Kapalamada: Jurnal Multidisipliner* 4, No. 02 (2025): 218–30, <https://doi.org/10.62668/Kapalamada.V4i02.1566>.

	Opini Publik Menurut Dan Nimmo dan Etika Politik Islam” (2025)	keputusan menjadi juru kampanye dianggap tidak bias			
4	Melsye Kurnia Astuti "Implikasi Partisipasi Perempuan dalam Politik di Era Digital pada Kriteria Memilih Pemimpin (Kajian Ma'anil Hadis)" (2024)	Kepemimpinan perempuan selalu menjadi polemik, padahal sandaran hadis yang digunakan adalah teks hadis yang sama. Karena itu muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa	Kesetaraan gender	Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan tematik hadis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua arus besar interpretasi hadis: kelompok tekstualis yang memahami hadis secara literal, yang menolak perempuan untuk memimpin, dan kelompok kontekstualis yang memahami hadis dengan cara yang historis dan sosial.
5	Nanda Aniza Fauzi, “Partisipasi dan Peran Politik Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (2023)	Partisipasi dan peran wanita dalam partai politik masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat hingga saat ini. Masyarakat berpikir bahwa wanita tidak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dan mempunyai peran politik di Indonesia..	Teori Partisipasi	penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis normative dilakukan dengan data sekunder.	bahwa peran dan partisipasi politik berbeda. Sementara partisipasi mengacu pada bentuk keterlibatan aktif dalam proses politik, peran lebih menekankan pada posisi dan tugas formal yang dilakukan.
6	Ilham Farhansyah “Komunikasi Politik Politisi Perempuan studi Deskriptif Kualitatif Integrated Marketing Communication Pada Politisi Perempuan Anggota DPRD Kab Garut 2019-2024” (2024)	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemasaran komunikasi terpadu terintegrasi dalam berkampanye dan mempertahankan konstituen agar mengetahui lebih dalam metode Integrated Marketing Communication yang digunakan para Politisi perempuan Anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024	Komunikasi Politik	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan studi deskriptif Integrated Marketing Communication dan paradigma konstruktivisme,	Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat timpang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan seks (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan gender (konstruksi sosial). Hal ini karena adanya persepsi dan konstruksi sosial yang menutup akses kaum perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang politik.
7	Windarshiharly “Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada	Partai politik memainkan peran penting dalam mempersiapkan perempuan untuk terlibat pada	Teori Feminis, dan Teori Keadilan	Metode penelitian empiris	Beberapa Partai Politik tidak merancang kebijakan internal untuk mendorong lebih banyak perempuan masuk ke

	Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan” (2022)	pemilihan legislatif. Karena kita ketahui di partai politik terjadi proses kaderisasi, pencalonan, kampanye, pendanaan, penggalangan suara, hingga penugasan calon dan anggota 8 legislatif. Selain itu, partai politik juga melakukan perumusan kebijakan di Institusinya			dalam posisi-posisi strategis dalam kepengurusan partai maupun dalam mekanisme pencalonan.
8	Nur Lisma, “Peran media sosial dalam mendorong partisipasi politik perempuan pada pemilu: Analisis media sosial dan keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Bandung” (2024)	Minimnya partisipasi perempuan dalam media dapat menyebabkan kurangnya isu-isu politik terkait perempuan itu sendiri, sehingga masyarakat akan lebih sedikit menerima informasi mengenai partisipasi perempuan dibandingkan sebelumnya.	Teori partisipasi politik Perempuan, feminisme, Komunikasi politik	Pendekatan kualitatif	bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Kota Bandung. Melalui Media sosial, perempuan dapat menyuarakan pendapat, mengakses informasi politik, dan berpartisipasi dalam diskusi publik secara lebih aktif.
9	Siti Khadijah, “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Kiprah Dakwah Partai Keadilan Sejahtera” (2024)	Pandangan bahwa perempuan dianggap lemah atau tidak sempurna karena perbedaan biologis telah lama menjadi bagian dari stereotip gender yang tidak akurat. Hal ini menjadi alasan untuk membatasi perempuan berpartisipasi aktif dalam partai politik. Partai politik dan ideologi memang seringkali terkait erat dan saling memengaruhi dalam dunia politik.	Citizens, media effect and public participation Komunikasi Politik	Metode kualitatif deskriptif.	Perempuan secara emosional memiliki kedekatan kedekatan yang lebih kuat dengan isu-isu sosial dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif politik perempuan PKS efektif dalam mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik perempuan ditunjukkan melalui sarana sebagai pembicara/pelatih, perempuan, menjadi influencer partai.
10	Titin Setyawati, “Komunikasi dan Partisipasi	keterlibatan perempuan dalam politik elektoral	Kesetaraan gender	Kualitatif	Perempuan yang berperan dalam politik elektoral masih menemui

	Perempuan Dalam Politik Elektoral” (2024)	dengan berbagai cara, mengungkap masalah yang dihadapi, dan strategi komunikasi yang diterapkan perempuan calon anggota legislatif untuk menarik suara pemilih.			berbagai masalah. Masalah utama yang dihadapi bukan berasal dari lawan politik tetapi justru dari dalam struktur keluarga dan diri mereka yang sering mengalami konflik peran antara peran domestik dan peran publik yang diemban.
11	Farhan Istiqlal, “Analisis Strategi Perempuan Dalam Mendapatkan Kepemimpinan politik Di Sumatera Barat” (2024)	Perempuan masih menghadapi hambatan signifikan dalam mencapai posisi kepemimpinan politik.	Faktor pendukung, Marketing Politik	penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Mereka aktif turun langsung ke masyarakat dan memanfaatkan berbagai jenis media, termasuk media konvensional dan media sosial. Pass Marketing, yang melibatkan tokoh masyarakat terkenal, diidentifikasi sebagai kelemahan karena dapat menimbulkan penolakan berbasis stereotip gender
12	Tirta Panduwinata, “Kebijakan Politik Afirmatif Dan Problematika Representasi Perempuan Di Parlemen Lokal pada DPRD Kabupaten Wonosobo” (2024)	Keterwakilan legislatif di Kabupaten Wonosobo saat ini tengah mengalami tren penurunan representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif justru seolah sangat membutuhkan peranan representasi politik substantif perempuan. Namun fenomena rendahnya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik ini bisa diidentifikasi penyebabnya melalui beberapa hal krusial.	Kesetaraan Gender, Feminisme	metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya perempuan menduduki kursi di DPRD, antara lain faktor kelembagaan dan pendanaan politik, doktrinasi agama, bias gender yang mengakar di masyarakat, dan kepemimpinan di partai politik.
13	Irmayanti, “Isu Ketidakadilan Gender Terhadap Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019(Studi Kasus: partai PDIP Dan	berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi gender. Meskipun kebijakan affirmative action telah diterapkan, realitas menunjukkan pemilu legislatif 2019	Feminisme Poskolonial, Komunikasi Politik	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan ketidakadilan gender.	Hasil yang diperoleh menyoroti dominasi kultur patriarki, relasi kekerasan dalam internal partai dan ruang digital, rendahnya tingkat literasi serta teknis pemilu serentak sebagai isu ketidakadilan yang

	partai Nasdem)” (2024)	menghadapi dinamika kompleks terkait isu ketidakadilan yang menargetkan calon legislatif perempuan			dihadapi caleg perempuan pada pemilu legislatif 2019.
14	Faini Busungi, “Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD provinsi Gorontalo” (2024)	Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang masih terbatasnya posisi di ranah publik yang berhasil diraih oleh kaum perempuan, misalnya di bidang legislatif tingkat lokal, peran serta perempuan dalam mengambil keputusan sangat penting dalam pembangunan daerah.	Feminisme	Penelitian Deskriptif	Anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo, mendapat dukungan dari kaum mayoritas, dan memberikan kemajuan jumlah kursi yang ada sebelumnya, sehingga perjuangan hak-hak perempuan mendapat perhatian yang lebih baik,
15	Wawan Saldi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Politik Perempuan DPRD Kabupaten Mamasa” (2025)	Masih banyak masyarakat yang meragukan politisi perempuan dalam setiap kontestasi pemilu, pilkada dan pileg.	Teori Persepsi dan gender	metode Kuantitatif melalui survey angket survey dengan responden yang berpatokan pada indikator yang telah ditentukan.	Indikator yang telah ditentukan, dengan persepsi Masyarakat terhadap politisi Perempuan DPRD Kabupaten Mamasa sangat baik, dapat dilihat dari hasil penelitian melalui indikator Akuntabilitas (2,25%) Responsivitas (2,03%) efektivitas (2.75%) kualitas kerja(2,73%)
16	Selvi Adriani, “Partisipasi Perempuan dalam Politik” (2024)	Tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah, dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pandangan tradisional yang merendahkan peran perempuan dalam politik.	Komunikasi Gender dan Komunikasi Politik	Studi Pustaka	bahwa pendidikan politik bagi perempuan menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi politik mereka dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri. Dukungan dari berbagai organisasi juga diperlukan untuk memberikan pelatihan dan jaringan yang mendukung perempuan dalam memasuki dunia politik.
17	Gopin Pamungkas, “Kesenjangan Gender: Perempuan	Kesenjangan gender terjadi terutama karena budaya atau kultur seperti budaya	Kesetaraan gender	Studi Pustaka	Saat ini banyak pengaturan yang mengatur terkait hak perempuan namun di

	Dalam Memeroleh Hak Politik' (2024)	patriarkis yang dominan dalam realitas masyarakat bahkan negara, yang mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan			dalam kehidupan nyata, perempuan masih sering diberikan batasan terutama dalam hal memperoleh atau mendapat akses ke dalam dunia politik. Hak politik perempuan masih sangat rendah dibandingkan dengan hak politik laki-laki karena dianggap belum mampu untuk bersaing dalam beberapa hal
18	Angelita Epiphania "Perempuan dan Patriarki Politik: Pola Violence Against Women in Politics dan Dinamika Politik di DPR RI periode 2014-2019 Hingga 2024-2029 (2025)	Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk sistem patriarki yang membatasi peran mereka dalam politik	Kesetaraan gender	Kualitatif deskriptif	sistem patriarki dan kekerasan politik masih menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini terlihat dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik (VAWP) yang telah dipaparkan.
19	Rahma Syakira Ayu, "Dampak Sistem Pemilu terhadap Keterwakilan Perempuan di PDIP: Studi Kasus Mekanisme Pemilu dan Strategi Partai dalam Pemenuhan Kuota Gender" (2025)	PDIP kembali menghadapi tantangan strategis untuk mencapai kuota 30% perempuan dalam pencalonan dan keterpilihan dalam Pemilu 2024. Meskipun demikian, komitmen ideologis partai tidak selalu dapat menyelesaikan masalah struktural yang muncul dalam sistem proporsional terbuka	Sistem Pemilu dan Keterwakilan, Teori Kouta Gender dan Afirmasi Politik	Kualitatif deskriptif	sistem proporsional terbuka membuat kandidat dalam satu partai bersaing ketat, yang seringkali menghalangi perempuan untuk terpilih. PDI-P memenuhi kuota gender dengan menggunakan metode seperti kaderisasi melalui organisasi sayap partai dan sistem zip dalam daftar calon legislatif.
20	Rizka Luluatul Hasanah, "Representasi Perempuan di Parlemen: Studi Perbandingan Keberhasilan Kuota Gender di Indonesia dan Swedia (2025)	Stereotip gender, marginalisasi dalam partai politik, serta minimnya dukungan struktural merupakan tantangan yang membuat perempuan sulit untuk masuk dan bertahan di dunia politik	Gender komunikasi politik	Kualitatif komparatif	keberhasilan representasi perempuan lebih ditentukan oleh faktor struktural seperti komitmen partai politik, sistem pemilu proporsional tertutup, dan budaya egaliter (Swedia), dibandingkan sekadar kebijakan kuota administratif (Indonesia)

Dari tabel-tabel di atas, peneliti telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai penelitian terdahulu guna menghindari duplikasi dan sekaligus bahan perbandingan untuk penelitian ini. Kajian Pustaka disusun dengan tujuan agar peneliti dapat memahami dan menerapkan teori-teori yang relevan dalam menganalisis objek penelitian yang akan dikaji.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian tentang perempuan dan politik di Indonesia biasanya terkonsentrasi pada tiga bidang besar: normatif-teoritis (tafsir hadis, hukum islam dan regulasi afirmatif) seperti yang dilakukan oleh Astuti (2025), Fauzi (2023), Windarshiharly (2022), Farhansyah (2024), dan Winata (2024). Sementara bidang selanjutnya adalah struktural-institusional (Sistem Pemilu, Kuota 30 %, dan dukungan partai, serta peran perempuan) seperti yang dilakukan oleh Ikrom (2025), Halipah (2024), Khoir (2025) Khadijah (2024), Setyawati (2024), Istiqlal (2024), Irmayanti (2024) dan Busungi (2024) dan perseptual-sosiologis (pandangan masyarakat terhadap perempuan) seperti yang dilakukan oleh Pamungkas (2024), Ephipania (2025) Ayu (2025), Hasanah (2025) Lisma (2025), Irmayanti (2024) dan Adriani (2024). Karena memiliki manfaat yang signifikan, penelitian-penelitian ini sering mengabaikan aspek komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan Muslim yang telah menjadi anggota legislatif. Selain itu, tidak banyak penelitian yang berfokus pada strategi komunikasi politik yang menggabungkan pemanfaatan media sosial, dakwah Islam, dan upaya untuk menghapus stereotip gender dalam konteks lokal tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai bagaimana

legislator perempuan Muslim membangun komunikasi politik yang tidak hanya bersifat elektoral melainkan juga bernuansa dakwah dan advokasi kesetaraan gender yang belum banyak dilakukan, sebagaimana terlihat di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam tiga aspek utama. Penelitian ini pertama menggunakan Teori Konvergensi Simbolik untuk menjelaskan bagaimana anggota DPRD perempuan Muslim mengembangkan narasi dan perspektif kolektif tentang kesetaraan gender yang dapat diterima oleh konstituen mereka. Kedua, penelitian ini menggunakan kerangka komunikasi melalui komputer untuk memahami bagaimana media sosial berfungsi sebagai media dakwah politik dan ruang representasi diri bagi legislator perempuan Muslim. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan Teori Representasi dan Gender untuk menganalisis bagaimana identitas perempuan Muslim direpresentasikan, dinegosiasikan, bahkan ditantang dalam arena politik formal maupun ruang dakwah non-formal seperti majelis taklim. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik baru dengan memberikan peta strategi komunikasi politik perempuan Muslim di DPRD Kepulauan Riau yang menghubungkan kesetaraan gender, dakwah Islam, dan politik.

F. Kajian Teori

1. Gender dan Pendekatan Islam dalam Politik

Pembahasan mengenai politik perempuan muslim tidak dapat dilepaskan dari dinamika konstruksi gender dalam masyarakat, baik dari aspek kultural, struktural maupun religious. Kehadiran perempuan bukan hanya

sebagai pelengkap, akan tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memperluas wacana politik yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁶¹ Politik perempuan menjadi ruang artikulasi gagasan, kepentingan dan aspirasi yang selama ini kerap terpinggirkan akibat dominasi struktur patriarki.⁶² Dalam konteks demokrasi modern, representasi perempuan dalam ruang politik menjadi salah satu indikator penting dalam kualitas demokrasi dan keberlanjutan sistem pemerintahan yang partisipatif.

Pendekatan gender dalam Islam memberikan landasan normatif yang kuat terhadap keterlibatan perempuan dalam ruang politik, dengan menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai bagian dari kesatuan umat. Yusuf al-Qardhawi bahkan menegaskan bahwa partisipasi politik dapat menjadi fardhu kifayah atau fardhu 'ain bagi perempuan, tergantung pada kebutuhan sosial dan konteks masyarakat.⁶³ Dalam sejarah Islam, peran aktif perempuan dalam ruang publik telah tercermin dari keteladanan tokoh-tokoh seperti Ummu Salamah, Asma binti Abu Bakar, dan Siti Aisyah RA istri Rasulullah, yang suaranya diakui dalam proses pengambilan keputusan. Realitas historis ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik perempuan bukanlah hal baru, melainkan memiliki akar teologis dan sosiologis yang kuat.⁶⁴ Oleh karena itu, pendekatan gender dalam Islam dapat menjadi pisau analisis kritis untuk membongkar

⁶¹ Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, ed. Muhammad Hanifuddin, Pertama (Yogyakarta: divapress, 2019), 64.

⁶² Heryanto, 272.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 527.

⁶⁴ Qardhawi, 522.

bias tafsir patriarki yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah politik dan publik.

Alimatul Qibtiyah membedakan pendekatan dalam memahami teks keagamaan yang terkait dengan gender dalam tiga corak utama: Pendekatan literalis, progresif, dan moderat. Pendekatan literalis cenderung menolak gagasan feminisme sebagai ideologi Barat yang dianggap tidak sejalan dengan Islam, termasuk soal kesetaraan perempuan dalam politik. Pendekatan progresif justru mendukung penafsiran Islam yang menegaskan kesetaraan gender dan peran egaliter perempuan dalam ranah politik. Sementara itu, pendekatan moderat bersikap selektif, menerima gagasan feminis selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendasar.⁶⁵ Spektrum pendekatan ini memberi ruang bagi perempuan Muslim untuk menentukan strategi perjuangan sesuai konteks sosial politik. Dalam konteks representasi gender, penting membedakan representasi deskriptif yang menitikberatkan pada keterwakilan numerik perempuan dan representasi substantif, yaitu kemampuan perempuan memperjuangkan isu strategis seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, dan kesejahteraan publik.⁶⁶

Representasi gender dalam politik sering kali berhadapan dengan tantangan kultural dan struktural yang kompleks. Perempuan kerap terhambat oleh norma budaya patriarki, stereotip gender, serta

⁶⁵ Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, 105–108.

⁶⁶ Gun Gun Heryanto, *Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2024), 280.

keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Politik masih sering dipersepsikan sebagai ranah maskulin yang mengutamakan dominasi laki-laki, sehingga kehadiran perempuan dianggap kurang signifikan.⁶⁷ Dalam situasi ini, metode analisis berbasis gender menjadi penting untuk membongkar relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam sistem politik, sekaligus menyoroti bagaimana ketimpangan tersebut dipelihara melalui struktur sosial, politik, dan budaya.

Representasi gender dalam politik menunjukkan perubahan penting, saat perempuan kini semakin berperan aktif dan berdaya dalam menentukan arah kebijakan publik. Analisis media berbasis gender mengungkap bahwa konstruksi maskulinitas dan feminitas masih banyak dibentuk melalui narasi, visual, dan bahasa yang menempatkan perempuan dalam standar patriarkal.⁶⁸ Namun, perempuan mulai menegosiasikan citra tersebut dengan membangun representasi politik yang lebih mandiri dan setara. Dengan demikian, representasi gender di ranah politik tidak hanya mencerminkan kehadiran perempuan secara simbolik, melainkan juga perjuangan untuk menegakkan kesetaraan dan menggeser wacana dominan menuju politik yang lebih inklusif dan adil.

Politik perempuan Muslim merupakan ruang strategis yang memadukan ajaran Islam, nilai keadilan gender, dan prinsip demokrasi. Pendekatan gender dalam Islam menegaskan bahwa kesetaraan laki-laki dan

⁶⁷ Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, 46.

⁶⁸ Alimatul Qibtiyah, *Media, Gender Dan Feminisme Di Indonesia Perspektif Komunikasi Penyiaran Islam* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2025), 28.

perempuan adalah bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pemikiran Alimatul Qibtiyah menekankan pentingnya reinterpretasi teks keagamaan agar lebih peka terhadap realitas sosial dan tidak terjebak pada tafsir patriarkal. Dengan demikian, politik perempuan Muslim tidak hanya menjadi arena representasi, tetapi juga sarana dakwah kultural untuk menghadirkan Islam yang inklusif, adil, dan berpihak pada kemanusiaan.

2. Teori Representasi dan Kesenjangan Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Oakley dalam *Sex, Gender, and Society* menjelaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses sosial dan budaya, bukan faktor biologis semata.⁶⁹ Konsep ini menegaskan bahwa ketimpangan gender muncul dari struktur sosial yang tidak seimbang.⁷⁰ Mansour Fakih menambahkan bahwa bias gender terjadi ketika perempuan ditempatkan pada posisi subordinat, mengalami diskriminasi, stereotip, marginalisasi, dan beban ganda.⁷¹ Ketimpangan ini berimplikasi langsung terhadap akses perempuan pada pendidikan, karier, dan terutama ruang politik, sehingga perjuangan kesetaraan gender menjadi upaya untuk meruntuhkan struktur sosial yang tidak adil.

Dalam konteks politik Indonesia, ketimpangan gender tampak dari rendahnya representasi perempuan di parlemen meskipun telah ada

⁶⁹ Kania, *Delusi Kesenjangan Gender Tinjauan Kritis Konsep Gender*, 10.

⁷⁰ Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 71–72.

⁷¹ Fakih, 13.

kebijakan afirmasi kuota 30%. Hambatan kultural seperti budaya patriarki dan stereotip negatif terhadap perempuan dalam ruang publik masih menjadi tantangan besar⁷². Untuk memahami dinamika ini, teori representasi Stuart Hall dalam Winda, menjadi penting karena menjelaskan bagaimana identitas perempuan dibentuk, diproyeksikan, dan diterima dalam masyarakat.⁷³ Representasi menjadi arena ideologis saat citra perempuan dapat dinegosiasikan kembali, menantang stereotip tradisional, dan membangun narasi baru tentang peran perempuan sebagai aktor politik yang aktif dan setara.

Mansour Fakih menegaskan bahwa bias gender merupakan konstruksi sosial yang dapat diubah, namun akan terus timpang selama stereotip dan diskriminasi dilembagakan dalam struktur masyarakat,⁷⁴ seperti anggapan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bahwa politik adalah domain laki-laki. Amina Wadud menambahkan bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim juga bersumber dari interpretasi keagamaan yang bias patriarki, padahal Al-Qur'an mengandung pesan kesetaraan.⁷⁵ Karena itu, representasi perempuan Muslim dalam politik memiliki dimensi politik sekaligus teologis, yakni sebagai agen reinterpretasi teks agama. Sementara itu, Alimatul Qibtiyah menekankan pentingnya pendekatan

⁷² Heryanto, *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, 287.

⁷³ Winda Ayuanda, Dindasari Sidabalok, and Alemina Br Perangin-angin, "Budaya Jawa Dalam Film Primbon: Analisis Representasi Stuart Hall," *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 7, no. 02 (2024): 442.

⁷⁴ Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 21.

⁷⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. (New York: Oxford University Press, 1992), 50.

komunikasi yang sensitif gender untuk melawan stereotip dan memperoleh legitimasi publik.⁷⁶ Dalam konteks lokal, perempuan Muslim di Kepulauan Riau perlu memanfaatkan simbol keagamaan, budaya lokal, dan media digital sebagai strategi komunikasi untuk menghadapi diskriminasi gender dan memperkuat peran mereka dalam ruang politik.

Menurut Mansour Faqih, dalam bukunya tentang Analisis Gender dan Transformasi Sosial, menegaskan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, berbeda dari seks yang bersifat biologis.⁷⁷ Ia mengidentifikasi lima bentuk ketidakadilan gender yakni, marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda, dan kekerasan yang menunjukkan bagaimana perempuan diposisikan secara struktural sebagai pihak subordinat.⁷⁸ Ketidakadilan ini bersifat sistemik dan dilembagakan dalam struktur sosial-politik, sehingga perubahan menuntut proses transformasi sosial melalui pendidikan, komunikasi, dan advokasi. Kesadaran kritis menjadi kunci untuk memahami bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan takdir biologis, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat dilawan dan diubah, sehingga melahirkan gerakan politik perempuan yang transformatif.⁷⁹

Dalam penelitian ini, teori Fakih digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami pengalaman politisi perempuan Muslim di DPRD

⁷⁶ Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, 107.

⁷⁷ Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 89.

⁷⁸ Fakih, 13–19.

⁷⁹ Fakih, 90–91.

Provinsi Kepulauan Riau yang menghadapi stereotip gender bahwa politik merupakan ranah laki-laki. Melalui strategi komunikasi politik berbasis dakwah dan pemanfaatan media sosial, mereka membangun narasi tandingan yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender di ruang publik. Kerangka Fakihi membantu mengungkap akar ketidakadilan gender sekaligus menganalisis bentuk perlawanan simbolik yang dilakukan oleh para legislator perempuan tersebut. Dengan demikian, mereka berperan sebagai aktor perubahan yang menggunakan komunikasi politik untuk menentang dominasi patriarki dan mendorong transformasi sosial yang lebih setara gender.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi pada dasarnya merupakan kebutuhan fundamental setiap makhluk hidup, terutama manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan bernalar sehingga sistem komunikasinya lebih kompleks. Komunikasi tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menjadi sarana membangun relasi sosial, mentransfer pengetahuan, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bersama. Secara etimologis, istilah “*communication*” berasal dari bahasa Latin *communicare* yang bermakna membuat sesuatu menjadi milik bersama, saling memberi, dan membangun pertahanan kolektif, yang menunjukkan fungsi komunikasi sebagai perekat sosial.⁸⁰ Secara epistemologis, komunikasi dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji proses penciptaan, penyampaian, dan pemaknaan pesan oleh individu

⁸⁰ Muhammad Mufid, *Etika Dan Filsafat Komunikasi*, lima (Depok: Prenadamedia Group, 2009), 52.

maupun kelompok melalui berbagai media, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai definisi ahli seperti Ruben, Lose, dan De Vito dalam Mufid sebagai berikut:⁸¹

- a. *“Communication means that information is passed from one place to another”* (Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat lain).
- b. *“Communication include(s) all the procedures by which one mind may affect another”* (komunikasi meliputi semua prosedur saat pikiran seseorang mempengaruhi orang lain).
- c. *“The transmission of information, ideas, emotion, skills, etc. By the use of symbol-word, pictures, figures, graph, etc”* (pemindahan menggunakan simbol-seperti kata, gambar, figure, grafik dan sebagainya).
- d. *“The Imparting conveying, or exchange of ideas, knowledge, or information whether by speech writing or signs”* (memberi meyakinkan atau bertukar ide, pengetahuan atau informasi yang baik melalui ucapan lisan maupun tanda).

Beragam ahli memberikan definisi komunikasi dengan penekanan berbeda. Harold D. Lasswell merumuskannya melalui pernyataan *“Who says what, in which channel, to whom, with what effect,”* yang menyoroti

⁸¹ Muhammad Mufid, *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran* (Depok: Prenadamedia Group, 2010), 2.

unsur pengirim, pesan, media, penerima, dan efek.⁸² Shannon dan Weaver melihat komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu dengan potensi gangguan yang mempengaruhi efektivitas pesan.⁸³ Sementara Wilbur Schramm memandang komunikasi sebagai proses berbagi makna melalui pertukaran simbol yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pemahaman.⁸⁴ Dari berbagai pandangan tersebut, komunikasi dapat disimpulkan sebagai proses dinamis pertukaran pesan, ide, pengetahuan, emosi, dan keterampilan untuk membangun kesamaan makna, mempengaruhi pikiran, serta memperkuat hubungan sosial dan keteraturan dalam masyarakat.

Komunikasi menjadi sarana utama dalam membangun interaksi sosial, sementara politik merupakan sarana untuk komunikasi dijalankan dalam konteks kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kehidupan bersama. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani polis (negara-kota) dan politikos (hal-hal terkait warga negara), yang sejak awal berkaitan dengan urusan publik dan kepentingan bersama.⁸⁵ Aristoteles memandang politik sebagai upaya mencapai kebaikan bersama,⁸⁶ Miriam Budiardjo melihatnya sebagai studi tentang usaha menciptakan kehidupan

⁸² Deddy Mulyana, "Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar," Sembilan B (Bandung: Remaja Roskadarya, 2020), 10.

⁸³ Redi Panuju, *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 20.

⁸⁴ Mufid, *Etika Dan Filsafat Komunikasi*, 62.

⁸⁵ Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berpikir Dalam Dimensi, Arts, Praxis & Policy* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.

⁸⁶ Dedy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 9–10.

yang baik melalui kekuasaan dan kebijakan publik⁸⁷, sementara David Easton menekankan politik sebagai *authoritative allocation of values* atau pengalokasian nilai secara otoritatif bagi masyarakat.⁸⁸ Dengan demikian, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan seni mengatur dan mengelola sumber daya demi kebaikan bersama melalui mekanisme kekuasaan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan publik.

Komunikasi dan politik merupakan dua unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Politik membutuhkan komunikasi untuk menyebarkan gagasan, membangun legitimasi, mempengaruhi opini publik, serta menjembatani relasi antara masyarakat dan penguasa.⁸⁹ Dari sinilah lahir konsep komunikasi politik sebagai cabang ilmu komunikasi yang mengkaji produksi, interpretasi, dan dampak pesan politik terhadap perilaku masyarakat.⁹⁰ Komunikasi politik tidak sekadar penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan opini dan sikap publik. Kotler menekankan pentingnya empati dalam proses komunikasi agar pesan dapat diterima secara efektif meski terdapat perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya.⁹¹ Dalam praktiknya, komunikasi politik merupakan aktivitas empirik penyampaian pesan politik oleh aktor politik, sekaligus menjadi bagian integral dari sistem politik dalam konteks ilmiah.

⁸⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 6–7.

⁸⁸ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 8.

⁸⁹ Soemarno, *Komunikasi Politik*, Kesepuluh (Tangerang Selatan: CV Jaya Abadi Utama, 2008), 13.

⁹⁰ Cecep Suryana, *Komunikasi Politik Teori Dan Praktik* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2018), 7.

⁹¹ Bonaraja Purba et al., *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*, ed. Janner Simarmata, 1st ed. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 4.

Dan Nimmo dalam buku *“Political Communication and Public Opinion in America”*⁹²

“... it is a book of political communication (activity) considered political by virtue of it is consequences (actual and potential) which regulate human conduct under conditions of conflict””

Dan Nimmo memandang politik sebagai tindakan kolektif dalam situasi konflik sosial, saat komunikasi politik berfungsi menjaga stabilitas melalui pertukaran simbol yang merepresentasikan kepentingan dan kekuasaan.⁹³ Komunikasi politik tidak sekadar gabungan antara “komunikasi” dan “politik”, akan tetapi disiplin tersendiri yang menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem kekuasaan. Komunikasi politik menghubungkan aspirasi publik dengan proses kebijakan pemerintah, sehingga berperan strategis dalam membangun legitimasi, stabilitas, dan keteraturan sosial dalam sistem politik yang demokratis.

Dalam praktiknya, komunikasi politik mencakup lima unsur utama yakni, komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek politik. Dan Nimmo menegaskan bahwa unsur-unsur tersebut berinteraksi secara simultan dalam membentuk opini publik dan perilaku politik masyarakat.⁹⁴ Komunikator politik baik dari kalangan politikus, profesional, maupun aktivis berperan menyampaikan pesan yang merepresentasikan gagasan dan kekuasaan. Media politik, baik media massa maupun tatap muka,

⁹² Dan Nimmo, *Political Communication and Public Opinion in America* (California: Goodyear Publishing Company, Santa Monica, 1978), 7.

⁹³ Soemarno, *Komunikasi Politik*, 17.

⁹⁴ Nimmo, *Political Communication and Public Opinion in America*, 8–9.

menjadi sarana strategis dalam menyebarkan informasi dan membangun persepsi publik, sementara khalayak berfungsi bukan hanya sebagai penerima, melainkan sebagai partisipan aktif dalam proses pembentukan opini politik.

Secara fungsional, komunikasi politik mencakup dua ranah yakni, suprastruktur politik, yang menekankan penyebaran kebijakan dan pembentukan legitimasi pemerintah, serta infrastruktur politik, yang menyalurkan aspirasi rakyat kepada penguasa. Kedua ranah ini membentuk arus komunikasi timbal balik antara negara dan masyarakat.⁹⁵ Dengan demikian, komunikasi politik berperan bukan hanya sebagai sarana penyampaian pesan, melainkan juga sebagai instrumen pembentuk kesadaran kolektif, partisipasi demokratis, dan legitimasi kekuasaan dalam sistem politik yang berkeadilan dan transparan.

4. Teori Konvergensi simbolik

Teori Konvergensi Simbolik (Symbolic Convergence Theory/SCT) pertama kali berakar dari penelitian Robert Bales tentang komunikasi kelompok kecil pada tahun 1950-an. Gagasan ini kemudian dikembangkan secara lebih luas oleh Ernest Bormann pada 1970-an dengan melihat peran simbol, cerita, dan fantasi sebagai pengikat makna kolektif yang mampu menyatukan individu dalam kelompok yang lebih besar.⁹⁶ Borman menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan proses pembentukan makna bersama yang menjembatani

⁹⁵ Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 15.

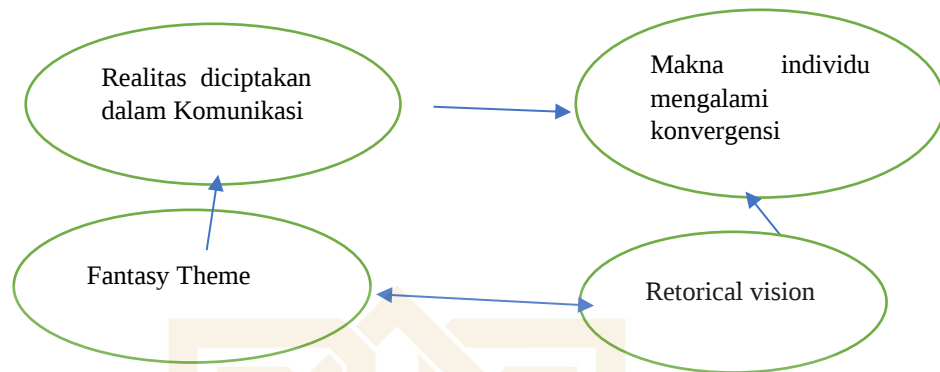
⁹⁶ Heryanto, *Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia*, 54.

dinamika komunikasi dari skala kecil menuju ranah sosial-politik yang lebih luas. Ia memperkenalkan konsep ini melalui tulisannya “*Fantasies and Rhetorical Vision: The Rhetorical Criticism of Social Reality*” dan terus memperluasnya dalam berbagai penelitian, termasuk tentang budaya kelompok, pengambilan keputusan, penyanderaan, kartun politik, hingga kampanye politik.⁹⁷

Dalam artikel “*Symbolic Convergence Theory: A Communication Formulation*”, Borman menjelaskan tiga aspek utama SCT: pertama, pola komunikasi berulang yang memunculkan kesadaran bersama; kedua, dinamika sistem komunikasi yang menjelaskan muncul dan hilangnya kesadaran kelompok; ketiga, faktor yang mendorong individu berbagi fantasi. Selain itu, ada dua asumsi utama SCT. Pertama, realitas sosial dibentuk melalui komunikasi, sehingga dunia sosial bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan hasil dari narasi dan simbol yang dibangun bersama. Kedua, makna simbolik individu dapat mengalami konvergensi, membentuk realitas kolektif yang diterima komunitas.⁹⁸ Konsep ini sangat relevan dalam konteks komunikasi politik, termasuk bagaimana perempuan Muslim membangun kesadaran kolektif tentang kesetaraan gender melalui narasi bersama.

⁹⁷ John G. Oetzel Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Theories of Human Communication* (Waveland press, 2016), 30.

⁹⁸ Israwati Suryadi, “Teori Konvergensi Simbolik,” *Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 02, no. 02 (2010): 425.



Gambar 1. 1
Asumsi Teori SCT

Konsep utama dalam *Symbolic Convergence Theory* (SCT) adalah *fantasy theme* dan *rhetorical vision*. *Fantasy theme* merujuk pada cerita, simbol, atau guyonan yang dibagikan dalam interaksi kelompok dan mampu membangkitkan keterlibatan emosional.⁹⁹ Ketika fantasi ini terus diulang dan menyebar, ia membentuk *rhetorical vision*, pandangan dunia bersama yang menyatukan identitas kelompok.¹⁰⁰ Menurut Littlejohn dan Foss, visi retorik menjadi fondasi solidaritas, legitimasi politik, dan arah perjuangan kolektif.¹⁰¹ Wilson dan Hanna juga menegaskan bahwa interaksi informal seperti obrolan, gosip, atau lelucon kelompok tidak boleh diremehkan, karena di sanalah proses konvergensi simbolik terbentuk.¹⁰² Dalam konteks politik perempuan Muslim, interaksi di komunitas, forum pengajian, maupun media sosial menjadi arena penting pembentukan identitas dan kesadaran kolektif terhadap isu kesetaraan gender.

⁹⁹ Ernest G Borman, *Communicating and Sharing Fantasy: Group Consciousness and Rhetorical Vision*. (Prospects Heights: Waveland Press., 1990), 4–6.

¹⁰⁰ Borman, 57.

¹⁰¹ Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, 32–33.

¹⁰² Gerald L. Wilson and Michael S. Hanna, *Groups in Context: Leadership and Participation in Small Groups* (New York: McGraw-Hill., 1993), 121–23.

SCT banyak digunakan untuk memahami komunikasi politik karena mampu menjelaskan kekuatan simbol dan retorika dalam membentuk solidaritas publik. Slogan politik seperti “salam dua jari” atau “perubahan” misalnya, tidak hanya menjadi jargon kampanye, tetapi juga *fantasy theme* yang menyatukan massa. Narasi perjuangan melawan diskriminasi, simbol religius seperti hijab, atau sebutan “ibu bangsa” menjadi elemen penting dalam membentuk kesadaran kolektif. Melalui komunikasi yang berulang di ruang publik, fantasi ini berkembang menjadi visi retorik bersama mengenai keadilan gender yang berakar pada nilai-nilai Islam, sehingga memperkuat solidaritas politik perempuan.

Salah satu aspek penting dalam komunikasi politik perempuan Muslim adalah pemanfaatan simbol religius untuk memperkuat legitimasi moral dan solidaritas kolektif. Menurut Deddy Mulyana, interaksi simbolik memungkinkan individu memberi makna khusus pada tanda dan simbol.¹⁰³ Dalam konteks ini, hijab, ayat Al-Qur'an tentang keadilan, serta istilah keibuan menjadi simbol yang mempersatukan komunitas politik perempuan Muslim. Simbol-simbol tersebut tidak hanya memperkuat identitas personal, tetapi juga membangun kohesi sosial dan mengubah pengalaman diskriminasi menjadi energi perjuangan bersama.¹⁰⁴ Ketika narasi ketidakadilan gender dibagikan dalam forum politik, ia membentuk

¹⁰³ Mulyana, “Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar,” 58.

¹⁰⁴ Suryadi, “Teori Konvergensi Simbolik,” 427.

ikatan emosional dan memperluas ruang pengaruh perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Berger & Luckmann dalam suryadi, menyebut realitas sosial sebagai konstruksi hasil komunikasi, sejalan dengan pandangan SCT yang menekankan bahwa kesetaraan gender dalam politik lahir dari pertukaran simbol, narasi, dan visi retorik bersama.¹⁰⁵ Dengan demikian, perjuangan perempuan Muslim bukan sekadar strategi politik, melainkan proses simbolik untuk membentuk realitas sosial baru yang lebih adil gender. Melalui *fantasy themes*, *rhetorical visions*, dan konvergensi simbolik, komunikasi perempuan Muslim menjadi sarana menciptakan kesadaran kolektif dan legitimasi politik. Kerangka SCT ini memberikan pijakan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana komunikasi membentuk narasi, solidaritas, serta peran perempuan dalam politik khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

5. Teori Computer Mediated Communication (CMC)

Computer Mediated Communication (CMC) merupakan salah satu teori penting dalam kajian komunikasi kontemporer, khususnya sejak hadirnya teknologi digital dan internet. CMC merujuk pada komunikasi yang terjadi melalui media digital seperti komputer, forum online, dan media sosial. Perkembangannya dimulai pada tahun 1970-an ketika komputer digunakan untuk pertukaran pesan dalam jaringan kerja.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, 36.

¹⁰⁶ Ahmad Mulyana and Agung Pragitya Vazza, *Social Construction of New Media in Cyberspace* (Depok: Rekacipta Proxy Media, 2023), 2-3.

Awalnya dianggap terbatas karena kurangnya aspek nonverbal seperti dalam komunikasi tatap muka, namun sejak era internet 1990-an hingga media sosial saat ini, CMC berkembang menjadi medium dengan karakteristik unik.¹⁰⁷ Salah satu tokoh penting dalam pengembangannya adalah Joseph B. Walther melalui *Social Information Processing Theory* dalam Richard, yang menolak pandangan bahwa komunikasi daring miskin makna dan justru menegaskan potensinya membangun relasi interpersonal yang kuat. Ia juga memperkenalkan konsep *hyperpersonal communication*, yaitu ketika interaksi daring bisa lebih intens daripada tatap muka menunjukkan kekuatan media sosial dalam membangun kedekatan antara politisi dan masyarakat.¹⁰⁸

Teori CMC berasumsi bahwa media digital tidak netral, melainkan membentuk cara pesan dikonstruksi, disampaikan, dan diterima.¹⁰⁹ Media sosial memungkinkan selektivitas presentasi diri, kontrol pesan, serta akses luas ke publik, sehingga menjadi alat strategis bagi tokoh politik untuk berkomunikasi. Selain itu, keterbatasan nonverbal dalam komunikasi daring dapat diatasi melalui simbol tekstual, emoticon, gambar, dan video.¹¹⁰ Dalam konteks komunikasi politik, fitur ini memungkinkan politisi membangun narasi, memperkuat pesan, dan

¹⁰⁷ Jong-Young Kim, "Social Interaction in Computer-Mediated Communication," *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* 26, no. 3 (2005): 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bult.153>.

¹⁰⁸ Richard West and Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis Dan Aplikasi*, lima (Jakarta: Salemba Humanika, 2017), 222.

¹⁰⁹ Siti Rina Apriliani, "Computer-Mediated Communication Sebagai Sarana Presentasi Diri Guru PAUD," *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 02, no. 02 (2020): 82.

¹¹⁰ Mulyana and Vazza, *Social Construction of New Media in Cyberspace*, 4.

menampilkan identitas politik secara kreatif. Dengan demikian, CMC menunjukkan bahwa komunikasi digital bukan sekadar pengganti komunikasi tatap muka, melainkan arena baru yang efektif untuk membangun hubungan, menyebarkan gagasan, dan membentuk opini publik.

Teori Computer Mediated Communication (CMC) dalam ranah politik menjadi instrumen strategis untuk membangun citra, menyebarkan gagasan, dan menggalang dukungan publik. Menurut Stormer-Galley, media digital memungkinkan komunikasi politik yang lebih interaktif, saat politisi dapat berdialog langsung dengan konstituen sehingga menggeser paradigma komunikasi dari model linier ke partisipatif.¹¹¹ Dalam konteks penelitian ini, CMC berperan sebagai katalis demokratisasi politik, memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Aplikasinya terlihat jelas ketika politisi, khususnya perempuan Muslim di DPRD Kepulauan Riau, memanfaatkan media sosial untuk merepresentasikan diri secara strategis. Melalui unggahan foto, video, dan pernyataan publik, mereka dapat menyatukan identitas religius dan politik, memperluas basis penerimaan publik, serta membangun citra sebagai legislator sekaligus figur dakwah.

Selain memperluas interaksi politik, CMC juga memungkinkan penyebaran pesan ke wilayah yang sulit dijangkau komunikasi tatap

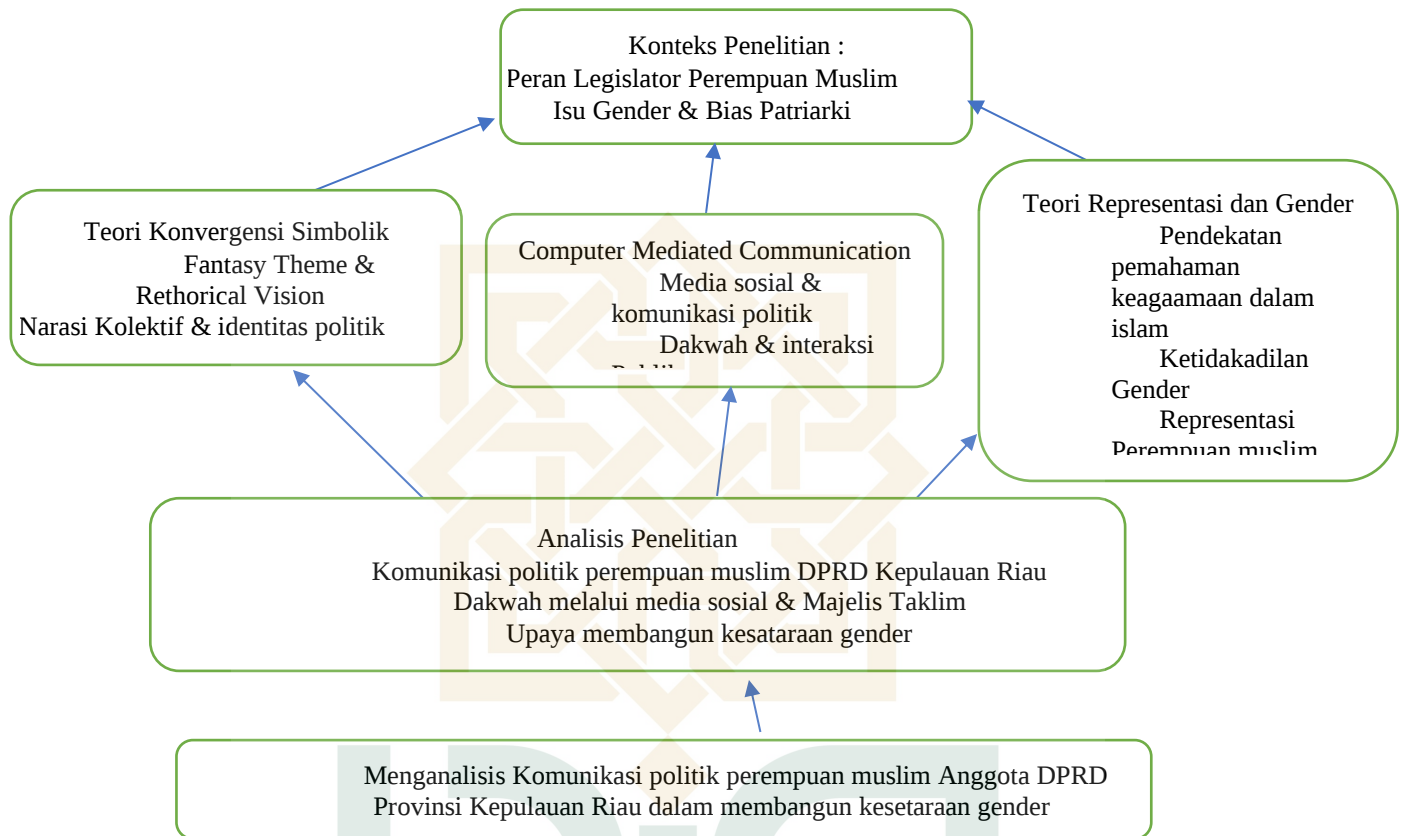
¹¹¹ Jennifer Stromer Galley, "On-Line Interaction and Why Candidates Avoid It," *Journal of Communication* 50, no. 4 (2006): 115, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02865.x>.

muka.¹¹² Dalam konteks kesetaraan gender, CMC membuka ruang bagi perempuan untuk melawan stereotip politik maskulin dan membangun narasi alternatif yang menegaskan kompetensi serta kontribusi mereka. Representasi digital ini berperan penting dalam mengubah persepsi publik melalui komunikasi yang konsisten dan strategis. Dengan demikian, CMC bukan sekadar media teknis, melainkan arena ideologis yang memperkuat peran politik perempuan Muslim dan memperluas cakrawala demokrasi partisipatif.

Bagi penelitian ini, CMC diaplikasikan untuk memahami bagaimana anggota legislatif perempuan muslim DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menggunakan media sosial sebagai medium komunikasi politik dan berdakwah. CMC menjelaskan dimensi digital strategi komunikasi mereka dalam membangun kesadaran kesetaraan gender di tengah masyarakat yang masih bias patriarkis. Peneliti menggunakan teori ini, dapat menggambarkan bahwa media sosial bisa berfungsi ganda, sebagai sarana representasi diri, dakwah Islami dan sekaligus advokasi gender di ranah publik.

¹¹² Fatma Dian Pratiwi, "(CMC) dalam Perspektif Komunikasi Lintas Budaya (Tinjauan Pada Soompi Discussion Forum Empress Ki Tanyang Shipper)," *Jurnal Komunikasi Profetik* 7, No. 01 (2014): 29.

6. Kerangka Berpikir



Gambar 1. 2
Bagan Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dari konteks sosial masyarakat Kepulauan Riau yang masih sarat dengan bias patriarki dan stereotip gender. Kondisi tersebut berdampak pada keterlibatan perempuan dalam ranah politik, termasuk pada anggota legislatif perempuan Muslim di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memahami realitas ini, penelitian menggunakan tiga pisau teori utama yang saling melengkapi, yaitu *Symbolic Convergence Theory* (SCT), *Computer Mediated Communication* (CMC), serta teori gender Mansour Fakih yang diperkaya dengan perspektif representasi feminisme Islam.

Symbolic Convergence Theory (SCT) digunakan untuk menganalisis bagaimana legislator perempuan Muslim membangun narasi kolektif dan visi

bersama tentang kesetaraan gender melalui komunikasi politik. Sementara itu, teori *Computer Mediated Communication* (CMC) menjelaskan peran media sosial dalam memperluas dakwah politik, membangun citra, dan menjangkau konstituen secara lebih luas. Di sisi lain, teori Mansour Fakih dan teori representasi gender memberikan kerangka kritis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender serta melihat bagaimana legislator perempuan Muslim menampilkan diri sebagai agen dakwah dan agen transformasi sosial.

Ketiga teori ini kemudian digunakan untuk menganalisis strategi komunikasi politik perempuan Muslim di DPRD Kepulauan Riau dalam menghadapi bias gender. Melalui aktivitas dakwah di media sosial, majelis taklim, maupun ruang parlemen, mereka berupaya membangun legitimasi politik sekaligus menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menyingkap bagaimana komunikasi politik perempuan Muslim berfungsi tidak hanya sebagai sarana elektoral, melainkan juga sebagai instrumen dakwah dan advokasi gender dalam membangun kesetaraan di Kepulauan Riau.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena

komunikasi politik perempuan Muslim anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun kesetaraan gender. Menurut Creswell dan Plano Clark, metode campuran memungkinkan peneliti menggabungkan kekuatan dari kedua pendekatan tersebut kualitatif untuk menggali makna subjektif dan konteks sosial, serta kuantitatif untuk mengukur dan memetakan pola-pola yang muncul dari temuan lapangan secara lebih sistematis¹¹³.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berakar pada tradisi penelitian komunikasi yang menekankan pemaknaan subjektif terhadap tindakan dan strategi komunikasi politik, sebagaimana ditegaskan oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk membaca fenomena sosial yang sarat nilai, ideologi, dan budaya.¹¹⁴ Komunikasi politik perempuan dipahami bukan sekadar aktivitas elektoral, melainkan sebagai arena perjuangan identitas, dakwah, dan representasi gender dalam konteks budaya Melayu Islam yang masih kental dengan bias patriarki. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pelengkap untuk memetakan kerangka berpikir para politisi perempuan Muslim melalui survei yang disebarkan secara terbatas kepada enam subjek utama penelitian. Survei ini mengacu pada tipologi pendekatan pemikiran masyarakat Muslim

¹¹³ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (New York: Sage Publication, 2018), 160–162.

¹¹⁴ Denzin Norman K. and Lincoln Yvonna S, “Handbook of Qualitative Research, 2nd Ed” (California: Sage Publication, 2009), 135.

Alimatul Qibtiyah yakni pendekatan literalis, moderat, dan progresif, mengidentifikasi posisi ideologis mereka terhadap isu kesetaraan gender, yang selanjutnya dianalisis secara terpadu dengan strategi komunikasi politik mereka di ruang publik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif. Menurut Robert K. Yin studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas.¹¹⁵ Studi kasus ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses komunikasi politik enam anggota DPRD perempuan: Ismiyati (PKS), Dewi Kumalasari (Golkar), dan Ririn Warsiti (Gerindra), Rohani (Golkar), Mesrawati Tampubolon (Demokrat), Clara Claudia (Gerindra) khususnya dalam membangun kesetaraan gender.

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan kualitatif berparadigma interpretatif dan pendekatan kuantitatif berparadigma positivistik ini memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi komunikasi politik perempuan. Penelitian ini tidak hanya menangkap makna dan narasi di balik tindakan politik, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap persepsi publik di Kepulauan Riau.

¹¹⁵ Robert K Yin, *Studi Kasus Desain Dan Metode* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), 18.

2. Fokus Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada pendekatan pemahaman gender dalam Islam yang dimiliki oleh politisi perempuan Muslim di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, serta strategi komunikasi politik dalam membangun kesetaraan gender. Penelitian ini juga melihat strategi mereka dalam memanfaatkan media sosial dan forum dakwah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan citra politik yang religius, inklusif, dan berpihak pada keadilan gender di masyarakat Kepulauan Riau.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian mencakup tiga anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai key informan yang aktif dalam komunikasi politik dan kegiatan keagamaan, yaitu: Ismiyati (PKS), aktif dalam dakwah digital dan media sosial. Dewi Kumalasari (Golkar), berperan dalam majelis taklim dan pemberdayaan perempuan. Ririn Warsiti (Gerindra), fokus pada kampanye kesetaraan gender melalui politik dan media publik. Serta tiga lagi sebagai pelengkap seperti: Mesrawati Tampubolon (Demokrat), Rohani (Golkar), dan Clara Claudiya (Gerindra). Mengingat isu yang diteliti cukup sensitif, maka nama yang dilaporkan dalam penelitian ini bukan nama sebenarnya.

Mereka dipilih karena merepresentasikan variasi pendekatan komunikasi politik dan dakwah dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: Perempuan Muslim anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau aktif, konsisten dalam aktivitas komunikasi publik dan keagamaan serta terlibat dalam advokasi isu kesetaraan gender.

Selain informan utama, penelitian juga melibatkan informan pendukung seperti staf ahli DPRD, pengurus partai, tokoh masyarakat, dan anggota majelis taklim untuk memperkaya data dan memperkuat triangulasi. Sejalan dengan pandangan Deddy Mulyana, pemilihan informan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi, bukan jumlah.¹¹⁶ Oleh Karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menangkap dinamika komunikasi politik perempuan Muslim secara mendalam dan kontekstual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan satu teknik pendukung dalam pendekatan kuantitatif dan tiga metode kualitatif yang saling melengkapi, yakni wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan pendekatan triangulasi untuk memperkuat validitas dan kedalaman makna data.

¹¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 10th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), 60.

a. Pemetaan Survey

Survei disebarkan secara terbatas kepada enam politisi perempuan Muslim anggota DPRD untuk mengidentifikasi kategori feminisme yang mereka anut: literalis, moderat, atau progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Alimatul Qibtiyah. Data hasil survei ini dianalisis secara deskriptif untuk mendukung temuan kualitatif, memperlihatkan gambaran pendekatan pemahaman gender dalam Islam yang dimiliki oleh subjek penelitian.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan terhadap empat anggota DPRD perempuan Muslim Provinsi Kepulauan Riau sebagai informan utama, serta beberapa informan pendukung seperti staf ahli, tokoh masyarakat, dan pengurus partai. Metode semi-terstruktur ini memungkinkan peneliti menggali strategi komunikasi politik, nilai dakwah Islam, peran media sosial, dan pandangan tentang kesetaraan gender.

c. Observasi

Observasi non-partisipan dilakukan pada kegiatan formal (rapat DPRD, pertemuan publik), kegiatan sosial keagamaan, dan aktivitas media sosial untuk menangkap perilaku komunikasi serta simbol-simbol politik dan religius secara langsung. Teknik ini menjaga

objektivitas dan mendokumentasikan interaksi nyata melalui catatan lapangan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap melalui arsip, berita media, unggahan media sosial, rekaman kegiatan keagamaan, teks pidato, dan dokumen resmi DPRD. Sumber ini membantu memberikan konteks historis dan simbolik dalam membangun citra politik perempuan Muslim. Semua data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Penelitian dapat menggambarkan secara komprehensif strategi komunikasi politik perempuan Muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Kepulauan Riau.

e. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder yang saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat anggota DPRD perempuan Muslim Provinsi Kepulauan Riau yang identitasnya peneliti samarkan guna menjaga privasi, serta informan pendukung seperti staf ahli, tokoh masyarakat, pengurus partai, ditambah observasi langsung terhadap aktivitas politik, sosial keagamaan, forum publik, dan penggunaan media sosial. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari dokumen resmi DPRD, arsip partai politik,

pemberitaan media massa, unggahan media sosial, rekaman kegiatan keagamaan, teks pidato, dan literatur akademik relevan. Seluruh data dianalisis secara triangulasi untuk memperkuat validitas dan kredibilitas temuan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi komunikasi politik perempuan Muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Provinsi Kepulauan Riau.

4. Teknik Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjamin keakuratan, keabsahan, dan keandalan temuan baik dari data kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada Lincoln dan Guba,¹¹⁷ terdapat empat kriteria utama dalam validasi data kualitatif: (a) Kredibilitas, dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member check, serta perpanjangan observasi untuk memastikan kesesuaian data dengan konteks sosial budaya; (b) Keteralihan, dicapai melalui thick description terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya Kepulauan Riau sehingga temuan dapat diterapkan pada konteks serupa; (c) Kebergantungan, dilakukan dengan dokumentasi sistematis proses penelitian (audit trail) untuk memastikan konsistensi dan transparansi; dan (d) Kepastian, dijaga melalui sikap reflektif peneliti dan penggunaan bukti empiris.

Sementara itu, untuk data kuantitatif dilakukan validasi isi (*content validity*) melalui penyusunan instrumen survei yang mengacu pada

¹¹⁷ Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kualitatif Dan Kuantitatif*, Edisi Kedu (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 150–51.

tipologi pendekatan pemikiran masyarakat Muslim Alimatul Qibtiyah yakni pendekatan literalis, moderat, dan progresif, serta uji keterbacaan instrumen kepada informan terbatas guna memastikan kejelasan dan ketepatan makna item pertanyaan. Selain itu, *peer debriefing* juga diterapkan untuk menguji ketajaman interpretasi peneliti dan memperkuat keandalan temuan. Kombinasi validasi kualitatif dan kuantitatif ini menjamin kredibilitas hasil penelitian mengenai komunikasi politik perempuan Muslim di DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif interpretatif yang dipadukan dengan analisis kuantitatif deskriptif untuk memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus terukur terhadap strategi komunikasi politik perempuan Muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Proses analisis dilakukan secara paralel dengan pengumpulan data agar penafsiran berlangsung kontekstual, reflektif, dan dinamis.

Mengacu pada Miles & Huberman dalam Abdul Hadi, terdapat tiga tahap utama:¹¹⁸

- a. Reduksi Data – memilah dan menyederhanakan informasi penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait strategi komunikasi, representasi identitas keislaman, dan perjuangan gender.

¹¹⁸ Abd. Hadi, Asrori, And Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Banyumas: Pena Pursada, 2021), 74–75.

- b. Penyajian Data – menyusun temuan dalam bentuk narasi tematik, kutipan wawancara tokoh DPRD, serta tabel tematik untuk memetakan pola komunikasi dan simbol dakwah.
- c. Penarikan Kesimpulan – menafsirkan makna simbolik praktik komunikasi politik perempuan Muslim sebagai bentuk dakwah, representasi identitas, dan perjuangan kesetaraan gender di ruang publik Kepulauan Riau.

Pada sisi kuantitatif, data survei dianalisis secara deskriptif untuk memetakan kecenderungan kategori pendekatan pemikiran masyarakat Muslim Alimatul Qibtiyah yakni pendekatan literalis, moderat, dan progresif, yang dianut politisi perempuan Muslim. Hasil analisis kuantitatif ini kemudian diintegrasikan dengan temuan kualitatif melalui proses data triangulation untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang strategi komunikasi politik mereka. Pendekatan ini memungkinkan temuan penelitian bersifat komprehensif, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Pembahasan

Kerangka penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab utama yang menyajikan alur penelitian secara logis dan menyeluruh. Setiap bab memiliki topik tertentu tetapi saling terhubung secara kuat untuk membangun argumentasi yang utuh. Dengan demikian pembaca dapat

mengikuti alur penelitian secara sistematis mulai dari penemuan masalah hingga pengambilan kesimpulan.

Pembahasan diawali dengan BAB I pendahuluan yang berfungsi sebagai fondasi konseptual penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang mengenai kontradiksi antara kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan dan realitas keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Diuraikan juga bagaimana membangun kesetaraan substantif yang menantang budaya patriarki, struktur politik maskulis dan tafsir keagamaan yang bias gender. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian literatur, kerangka teori dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. Dengan demikian BAB I berfungsi sebagai pijakan argument yang menjelaskan urgensi kajian komunikasi politik perempuan muslim dalam konteks politik lokal di Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Bab II Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi deskripsi komprehensif mengenai konteks sosial-politik penelitian. Bab ini memaparkan profil Provinsi Kepulauan Riau, struktur kelembagaan DPRD, daerah pemilihan, komposisi anggota legislatif, serta representasi perempuan dalam parlemen daerah. Selain itu, dijelaskan pula latar belakang ideologi partai politik dan posisi anggota DPRD perempuan Muslim dalam konfigurasi politik lokal. Bab ini berfungsi sebagai landasan kontekstual agar analisis pada bab berikutnya tidak terlepas dari realitas empiris dan struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Dengan landasan konteks tersebut, pembahasan berlanjut pada Bab III Analisis Komunikasi Politik Perempuan Muslim dalam Membangun Kesetaraan Gender, yang merupakan inti kajian teoritik dan empiris. Bab ini mengelaborasi tiga fokus utama penelitian. Pertama, analisis mengenai pendekatan pemahaman gender dalam Islam yang dianut politisi perempuan Muslim, baik dalam spektrum moderat maupun progresif. Kedua, pembahasan tentang praktik komunikasi politik yang dijalankan, termasuk strategi persuasif berbasis nilai keagamaan, kedekatan emosional, dan legitimasi kultural. Ketiga, analisis strategi komunikasi melalui media sosial dan forum dakwah sebagai medium artikulasi isu kesetaraan gender. Pada bagian akhir, disajikan sintesis temuan yang menghubungkan pemahaman gender, pola komunikasi, serta masa depan kepemimpinan perempuan dalam politik lokal.

Setelah analisis dipaparkan secara mendalam, Bab IV Penutup menyajikan simpulan sebagai jawaban komprehensif atas rumusan masalah penelitian. Bab ini merumuskan temuan utama terkait pola komunikasi politik perempuan Muslim, strategi membangun legitimasi publik, serta dinamika negosiasi antara nilai agama dan kesetaraan gender. Selain itu, dipaparkan keterbatasan penelitian sebagai bentuk refleksi akademik, sekaligus rekomendasi yang bersifat praktis bagi politisi perempuan dan partai politik, serta rekomendasi akademik bagi pengembangan studi komunikasi politik berbasis gender di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang “Komunikasi Politik Perempuan Muslim dalam Membangun Kesenjangan Gender Studi Kasus Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau” dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil survey penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman moderat sama kuatnya dengan pemahaman progresif. Namun jika dilihat secara terperinci dengan data kualitatif posisi yang dominan di kalangan politisi perempuan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Pemahaman ini ditandai dengan pengakuan atas kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ruang politik dan publik, namun tetap mempertahankan pembagian peran domestik yang bersifat tradisional. Posisi moderat merefleksikan upaya negosiasi antara nilai keadilan gender dan norma keagamaan yang telah mapan, sehingga secara politik relatif aman dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Namun, kecenderungan ini juga berpotensi membatasi dorongan terhadap perubahan struktural karena kesetaraan lebih dipahami sebagai prinsip moral daripada agenda transformasi kebijakan. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan orientasi progresif pada sebagian politisi perempuan yang tidak hanya mengakui kesetaraan gender, namun juga secara aktif mengkritisi budaya patriarki, struktur politik, dan kebijakan negara yang memproduksi ketimpangan gender.

2. Komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi perempuan Muslim anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, melainkan sebagai komunikator politik dan agen perubahan sosial. Para politisi membangun komunikasi politik yang bersifat persuasif berbasis kedekatan emosional dan mengedepankan nilai-nilai keagamaan sebagai sumber legitimasi moral. Praktik komunikasi politik ini tidak hanya berada di ruang formal parlemen, namun juga di ruang-ruang kultural seperti majelis taklim, kegiatan sosial kemasyarakatan serta interaksi langsung dengan para konstituen.
3. Strategi komunikasi politik politisi perempuan Muslim DPRD Provinsi Kepulauan Riau semakin berkembang dengan pemanfaatan media sosial sebagai ruang komunikasi publik alternatif. Media sosial digunakan untuk menyebarkan gagasan kesetaraan gender, membangun citra politik, memperluas jangkauan audiens, serta mengartikulasikan isu-isu perempuan dan keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral, karena politisi perempuan masih menghadapi bias gender, stereotip, dan kekerasan simbolik, termasuk penilaian terhadap aspek personal dan fisik yang sering kali mengaburkan substansi gagasan politik yang disampaikan. Dengan demikian, media sosial menjadi ruang yang sekaligus membuka peluang dan menghadirkan tantangan bagi perjuangan kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik perempuan Muslim dalam membangun kesetaraan gender di DPRD Provinsi Kepulauan Riau merupakan proses dialektis antara nilai Islam, konstruksi gender, dan strategi komunikasi politik. Perjuangan kesetaraan gender tidak hanya berlangsung pada level kebijakan, namun juga melalui narasi, simbol, dan praktik komunikasi yang terus dinegosiasikan dalam ruang sosial, kultural, dan digital. Oleh karena itu, penguatan peran politik perempuan Muslim memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat struktural, namun juga kultural dan komunikatif, agar kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih substantif dan berkelanjutan dalam kehidupan politik lokal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, beberapa saran disusun sebagai rekomendasi praktis, kebijakan serta pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Saran Praktis

Para politisi perempuan Muslim DPRD Provinsi Kepulauan Riau disarankan untuk memperkuat literasi gender serta mengembangkan komunikasi politik yang persuasif dan berkelanjutan. Pemanfaatan media sosial dan forum dakwah perlu diarahkan tidak hanya pada publikasi kegiatan, melainkan sebagai ruang edukasi publik dan advokasi isu kesetaraan gender yang berbasis pada substansi kebijakan.

2. Saran Kebijakan

Partai politik dan pemerintah daerah disarankan untuk memberikan dukungan struktural yang lebih nyata bagi para politisi perempuan, tidak terbatas pada pemenuhan kuota keterwakilan, melainkan juga melalui penguatan kapasitas, akses pengambilan keputusan dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus wilayah kajian yang hanya mencakup DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta jumlah informan yang terbatas pada politisi perempuan Muslim. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan subjek penelitian, termasuk membandingkan komunikasi politik politisi perempuan di daerah lain atau melibatkan politisi laki-laki sebagai pembanding dalam memahami dinamika kesetaraan gender.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disadari. Pertama peneliti mengalami kesulitan dalam memperoleh akses langsung untuk mengikuti aktivitas para informan sebagai para politisi di DPRD dalam jangka waktu relatif panjang. Keterbatasan ini disebabkan oleh padatnya agenda politik dan institusional informan, sehingga peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan observasi partisipatif secara intensif selama beberapa minggu sebagaimana telah direncanakan sebelumnya.

Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya data observasional terkait dinamika komunikasi politik informan dalam konteks keseharian mereka di beberapa Lembaga legislatif.

Kedua, proses wawancara juga menghadapi sejumlah kendala. Peneliti mengalami kesulitan menjadwalkan wawancara dengan beberapa informan akibat keterbatasan waktu yang dimiliki informan serta adanya dinamika internal yang mempengaruhi ketersediaan mereka. Selain itu terdapat keterbatasan akses terhadap salah satu informan yang merupakan anggota DPRD, saat proses wawancara harus melalui prosedur formal dan diwakili oleh tim staf ahli. Situasi ini menyebabkan peneliti tidak dapat menggali pengalaman dan pandangan informan secara langsung dan mendalam. Di samping itu, peneliti juga menemukan adanya beberapa informan yang memilih untuk tidak diwawancarai secara langsung, sehingga data yang diperoleh menjadi terbatas pada informan yang bersedia dan dapat diakses selama penelitian berlangsung.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ahmad Fatikhul Amin. *Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Madura: IAIN Madura Press, 2021.
- Adriani, Selvia, and Siti Tiara Maulia. "Partisipasi Perempuan dalam Politik." *Journal of Practice Learning and Educational* 4, no. 2 (2024): 131–36. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>.
- Akbar, Dhani, Ryan Anggria Pratama, Riama Lisnawati Sianturi, and Nadya Triyana. "Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia : Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau." *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 166–77.
- Amdimas, Firnanda. "Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat (Studi pada Partai Gerindra Dan PPP)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 4849–56.
- Amin, Mansyur. "Wanita Itu Orang Banten." *Tempo.Com*, 1977.
- Amin, Rajabbul. *Kala Laut Bicara, Pulau Mendengar Jalinan Makna Komunikasi Budaya Di Bumi Segantang Lada*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- . "Mengurai Kompleksitas Politik Identitas Dan Dinasti Politik Di Kepri, Kebhinekaan Atau Kepentingan Elit." *indopost.co*, 2024. <https://indopost.co/mengurai-kompleksitas-politik-identitas-dan-dinasti-politik-di-kepri-kebhinekaan-atau-kepentingan-elit/berita-hari-ini/indopost/>.
- . "Para Perempuan Hebat Di Kepulauan Riau, Dari Istana Melayu Hingga Ruang Publik." *Indonesiana* by tempo, 2026. <https://www.indonesiana.id/read/190838/para-perempuan-hebat-di-kepulauan-riau-dari-istana-melayu-hingga-ruang-publik>.
- Aminuddin, M. Faishal. *Politik Mantan Serdadu: Purnawirawan Dalam Politik Indonesia 1998-2014/M*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Apriliani, Siti Rina. "Computer-Mediated Communication Sebagai Sarana Presentasi Diri Guru PAUD." *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 02, no. 02 (2020): 80–94.
- Asrida, Wan, Wazni, and Chitra Puspita Dewi. "Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 17 (2012).
- Astuti, Melsye Kurnia. "Implikasi Partisipasi Perempuan dalam Politik di Era Digital pada Kriteria Memilih Pemimpin (Kajian Ma'anil Hadis)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Ayu, Rahma Syakira, Ananda Dewi, Nayla Febrina Putri, and I Aniqotul Ummah. "Analisis Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Golkar : Studi Kasus Peran dan Strategi Organisasi Sayap Kppg." *Governance : Jurnal*

- Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 12, no. 1 (2025): 55–65.
- Ayu, Rahma Syakira, Ananda Dewi, Nayla Febrina Putri, and Lia Wulandari. “Dampak Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan di PDIP : Studi Kasus Mekanisme Pemilu dan Strategi Partai Dalam Pemenuhan Kuota Gender.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2398>.
- Ayuanda, Winda, Dindasari Sidabalok, and Alemina Br Perangin-angin. “Budaya Jawa Dalam Film Primbon : Analisis Representasi Stuart Hall.” *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 7, no. 02 (2024): 440–49.
- Basuungi, Faini, and Andi Yusuf Katili. “Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 02 (2024): 101–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.69623/j-emspol.v1i2.11>.
- Basyir, Ach. “Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme.” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2014): 237–58.
- Borman, Ernest G. *Communicating and Sharing Fantasy: Group Consciousness and Rhetorical Vision*. Prospects Heights: Waveland Press., 1990.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. New York: Sage Publication, 2018.
- Dalziel, Raewyn. “The Colonial Helpmeet: Women’s Role and the Vote in Nineteenth-Century New Zealand.” *New Zealand Journal of History* 11, no. 2 (1977): 112–13. <https://muse.jhu.edu/article/870217>.
- Demokrat, Partai. *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat*, n.d.
- Dinata, Leo Surya. *Golkar dan Militer-Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Faizal, Akbar. *Partai Demokrat & SBY: Mencari Jawab Sebuah Masa Depan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Keenam Belas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Farhansyah, Illham. “Komunikasi Politik Politisi Perempuan ‘Studi Deskriptif Integrated Marketing Communication pada Politisi Perempuan Anggota DPRD Kab Garut 2019-2024.’” Universitas Garut, 2024.
- Fauzi, Nanda Aniza. “Partisipasi dan Peran Politik Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Hadi, Abd., Asrori, and Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: Pena Pustaka, 2021.

- Halipah. “Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024).” Universitas Fajar, 2024.
- Hariankepri. “602 Caleg Bertarung Ke DPRD Kepri, 39 Persen dari Kaum Perempuan.” *HarianKepri.com*, 2023. hariankepri.com/602-caleg-bertarung-ke-dprd-kepri-39-persen-dari-kaum-perempuan/.
- Hartono, Rini. “Sejarah Suffragette dan Perjuangan Hak Pilih Perempuan.” *Berdikari Online*, 2022. <https://www.berdikarionline.com/mengenal-suffragette-dalam-sejarah-perjuangan-hak-pilih-perempuan/>.
- Hasanah, Rizka Luluatul, Nabila Kheisyah Zelvadhia, Santi Mulyadi, and Nurdin. “Representasi Perempuan di Parlemen : Studi Perbandingan Keberhasilan Kuota Gender di Indonesia.” *KAPALAMADA: Jurnal Multidisipliner* 4, no. 02 (2025): 218–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/kapalamada.v4i02.1566>.
- Herbert, Feith. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia, 1999.
- Heryanto, Gun Gun. *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Edited by Muhammad Hanifuddin. Pertama. Yogyakarta: divapress, 2019.
- . *Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2024.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2007.
- Irmayanti. “Isu Ketidakadilan Gender Terhadap Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus pada Partai PDIP dan Partai Nasdem).” Universitas Nasional, 2024.
- Istiqbal, Farhan. “Analisis Strategi Perempuan dalam Mendapatkan Kepemimpinan Politik Di Sumatera Barat.” *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2024.
- K., Denzin Norman, and Lincoln Yvonna S. “Handbook of Qualitative Research, 2nd Ed.” California: Sage Publication, 2009.
- Kania, Dinar Dewi. *Delusi Kesetaraan Gender Tinjauan Kritis Konsep Gender*. Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018.
- Khadijah, Siti, and Fakultas Komunikasi. “Partisipasi Politik Perempuan dalam Kiprah Dakwah Partai Keadilan Sejahtera.” *JORCS The Journal of Religion and Communication Studies* 1, no. 1 (2024): 1–12.
- Khoir, Miftahul. “Komunikasi Politik Bupati Bantul Sebagai Juru Kampanye Pilpres 2024: Perspektif Opini Publik Menurut Dan Nimmo dan Etika Politik Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.
- Kim, Jong-Young. “Social Interaction in Computer-Mediated Communication.” *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* 26, no. 3 (2005): 15–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bult.153>.

- Koiruddin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Kontu, Fransin, and Stefanus Pesak. "Kuota 30 % Perempuan di Parlemen : Implementasi dan Efektivitasnya Di Indonesia." *PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy* 02, no. 01 (2025): 64–73. <https://journal.papsel.org/index.php/JHP/index%0AKuota>.
- Lisma, Nur. "Peran Media Sosial dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu: Analisis Media Sosial dan Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Di Kota Bandung." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024.
- Lutfi, Basit. *Lensa Gender Di Mata Media Massa: Meta Analisis Politisi Perempuan*. Medan: UMSU PRESS, 2022.
- Maksudi, Dedy Irawan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013.
- Maxwel, John, and Soe Hok Gie. *Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Mohammad, Ikrom. "Strategi Komunikasi Pimpinan Wanita Islam Alkhairaat Dalam Memperkuat Peran Politik Perempuan Muslim di Kota Palu 2019-2024 M." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.
- Mufid, Muhammad. *Etika Dan Filsafat Komunikasi*. Lima. Depok: Prenadamedia Group, 2009.
- . *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran*. Depok: Prenadamedia Group, 2010.
- Mukarom, Zaenal. *Komunikasi Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Mulyana, Ahmad, and Agung Pragitya Vazza. *Social Construction of New Media in Cyberspace*. Depok: Rekacipta Proxy Media, 2023.
- Mulyana, Deddy. "Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar," Sembilan B. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 10th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Natsir, Lies Marcoes, Marzuki Wahid, Mahrul el Mawa, Nur Rofi'ah, Ida Rosyidah, Khariroh Ali, Testriyono, et al. *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Orde Baru*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), 2012.
- Nazaki, and Nur A Dwi Putri. "Keterwakilan Politik Perempuan Kepulauan (Harapan Yang Tidak Kunjung Tercapai)." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 05, no. 01 (2020): 112–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2684>.
- Nimmo, Dan. *Political Communication and Public Opinion in America*. California: Goodyear Publishing Company, Santa Monica, 1978.
- Ogen. "KPU Tetapkan 45 Anggota DPRD Kepri, Terpilih Ini Daftarnya." antaranews.com, 2024.
- Pamungkas, Gopin, and Intan Agristin. "Kesenjangan Gender : Perempuan dalam

- Memperoleh Hak Politik.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 507–11. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0A>.
- Panuju, Redi. *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Partai Gerindra. “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2020,” 2020.
- Pratiwi, Fatma Dian. “(CMC) Dalam Perspektif Komunikasi Lintas Budaya (Tinjauan Pada Soompi Discussion Forum Empress Ki Tayang Shipper).” *Jurnal Komunikasi PROFETIK* 7, no. 01 (2014): 29–44.
- Prihatini, Ella S. “Islam, Parties, and Women’s Political Nomination in Indonesia.” *Politics & Gender* 16, no. 03 (2019): 637–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1743923X19000321>.
- Purba, Bonaraja, Sherly Gaspersz, Muhammad Bisyr, Angelia Putriana, Puji Hastuti, Efendi Sianturi, Diki Retno Yuliani, et al. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*. Edited by Janner Simarmata. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Purwanti, Firliana. “Perempuan Partai Demokrat: Dulu, Sekarang dan Masa Depan.” *Demokrat.or.id*, 2022. <https://www.demokrat.or.id/perempuan-partai-demokrat-dulu-sekarang-dan-masa-depan/>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- . *Media, Gender dan Feminisme Di Indonesia Perspektif Komunikasi Penyiaran Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2025.
- . “Peran Suami di Balik Keberhasilan Politikus Perempuan.” *Suara Aisyah*, 2019.
- . “Arya Fendha, and Ibnu Shina, “Husbands Remain as Imāms: The Phenomenon of House Husband in Yogyakarta and Ponorogo, Indonesia,” *Al-Ahwal* 17, no. 2 (2024): 221–44, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17205>.
- Rachmat, Kriyanton. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rahmat, M Imdadun. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2008.
- Rnh, Angelita Epiphania, Marlan Hutahae, and Artha Lumban Tobing. “Perempuan dan Patriarki Politik : Pola Violence Against Women in Politics dan Dinamika Politik Di DPR RI Periode 2014-2019 Hingga 2024-2029.” *JouLaGe: Journal of Laguna Geography* 04, no. 01 (2025): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.52562/joulage.v4i1.1532> Journal of Laguna Geography <https://journal.moripublishing.com/index.php/joulage> |.
- Saldi, Wawan. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Politisi Perempuan DPRD Kabupaten Mamasa.” Universitas Sulawesi Barat, 2025.
- Setiawati, Titin, and Vilya Dwi Agustini. “Komunikasi dan Partisipasi Perempuan

- Dalam Politik Elektoral.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 162–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3751>.
- Sinaga, Rudi Salam. *Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berpikir dalam Dimensi, Arts, Praxis & Policy*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Soemarno. *Komunikasi Politik*. Kesepuluh. Tangerang Selatan: CV Jaya Abadi Utama, 2008.
- Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, John G. Oetzel. *Theories of Human Communication*. Waveland press, 2016.
- Stromer Galley, Jennifer. “On-Line Interaction and Why Candidates Avoid It.” *Journal of Communication* 50, no. 4 (2006): 111–32. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02865.x>.
- Suparman. “Konsep Syura dalam Politik Islam Menurut Al- Qur ’ An.” *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024): 226–36. http://sophisticated.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ppi_uinjambi_2022/article/view/44/27.
- Suryadi, Israwati. “Teori Konvergensi Simbolik.” *Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 02, no. 02 (2010): 426–37.
- Suryana, Cecep. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2018.
- Tanjung, Akbar. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Transformative, Jurnal. “Dinamika Politik Catch-All Atas Eksistensi Perempuan Di Partai Demokrat Dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten.” *Jurnal Transformative* 9, no. 2 (2023): 127–45. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.1>.
- Wadud, Amina. *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Walters, Margaret. *Feminisme Pengantar Untuk Pemula* Terj. Devi Santi Ariani. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- West, Richard, and Lynn H. Turner. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Lima. Jakarta: Salemba Humanika, 2017.
- Wilson, Gerald L., and Michael S. Hanna. *Groups in Context: Leadership and Participation in Small Groups*. New York: McGraw-Hill., 1993.
- Winata, Tirta Pandu, Rizky Amalia Putri, Universitas Tidar, and Universitas Jenderal Soedirman. “Kebijakan Politik Afirmatif dan Problematika Representasi Perempuan di Parlemen Lokal Pada DPRD Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 20, no. 1 (2024): 77–98. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>.
- Windarsiharly. “Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan.” Universitas Hasanudin, 2022.

- Wolf, Susan. "Martha C. Nussbaum: Human Capabilities, Female Human Beings." Edited by Martha C Nussbaum and Jonathan Glover. *Women, Culture, and Development: A Study of Human Capabilities*. Oxford University Press, November 30, 1995. <https://doi.org/10.1093/0198289642.003.0004>.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013.
- Yusro, Safawardi, Huda Miftahul, and Karno. *Cara Kerja Ilmu -Ilmu*. Edited by Abd. Muid. Jakarta: PTIQ PRESS, 2018.
- Zamroni, Mohammad. "Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender." *Jurnal Dakwah* XIV, no. 1 (2013): 103–32. <https://media.neliti.com/media/publications/77701-ID-perempuan-dalam-kajian-komunikasi-politi.pdf#page=8.17>.
- Wawancara Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- Wawancara Sekwan DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- Wawancara Tokoh Politik PKS
- Wawancara Staf DPRD Provinsi Kepulauan Riau